

**KAJIAN  
EKONOMI REGIONAL  
PROVINSI RIAU**

**Triwulan I - 2007**

**Kantor Bank Indonesia  
Pekanbaru**

#### VISI BANK INDONESIA :

"Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil "

#### MISI BANK INDONESIA :

"Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan "

#### NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI BANK INDONESIA :

"Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan "

## KATA PENGANTAR

**BUKU** Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau ini merupakan terbitan rutin triwulanan yang berisi potret perkembangan ekonomi dan perbankan di Propinsi Riau. Mulai triwulan I tahun 2005 kajian difokuskan pada perkembangan ekonomi dan keuangan di Propinsi Riau (tidak termasuk Propinsi Riau Kepulauan) dengan cakupan kajian meliputi perkembangan ekonomi regional dengan penekanan pada inflasi, kondisi ekonomi makro regional (PDRB, Keuangan Daerah, Investasi, dan Ekspor-Import), Perkembangan moneter, perbankan dan sistem pembayaran regional, serta perkiraan perkembangan ekonomi daerah. Analisis dilakukan berdasarkan data laporan bulanan bank umum dan BPR, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, serta data dari BPS, Departemen Tenaga Kerja, dan instansi terkait lainnya.

Tujuan dari penyusunan buku laporan triwulanan ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di propinsi Riau, dengan harapan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan buku ini. Untuk itu masukan terutama *supply* data terkini, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, Mei 2007  
BANK INDONESIA PEKANBARU

ttd

Muhamad Nur  
Pemimpin

## DAFTAR

## ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1. EVALUASI KONDISI EKONOMI MAKRO REGIONAL	9
1. PDRB dari Sisi Permintaan	10
1.1. PDRB Tanpa Migas	10
1.2. PDRB Dengan Migas	12
2. PDRB dari Sisi Penawaran	13
2.1. PDRB Tanpa Migas	13
2.2. PDRB Dengan Migas	17
3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).	20
3.1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA	20
3.2. Peringkat Realisasi PMA dan PMDN	23
4. Keuangan Pemerintah Daerah	23
4.1. Posisi Gabungan Keuangan Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) pada Triwulan IV 2006	25
5. Perkembangan Ekspor – Impor Non Migas	26
5.1. Ekspor Non Migas	27
5.2. Impor Non Migas	30
5.3. Nilai Ekspor Non Migas dan Impor Non Migas menurut Valuta dan Cara Pembayaran	31
BOKS 1. Program Revitalisasi Perkebunan Propinsi Riau	

BAB 2.	EVALUASI PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL	33
1.	Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru	33
2.	Perbandingan Dengan Angka Inflasi Nasional	36
3.	Perkembangan Komponen-komponen Inflasi di Kota Pekanbaru	37
BOKS 2. Ketahanan Pangan Propinsi Riau		
BAB 3.	PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	39
1.	Perkembangan Moneter	41
2.	Perkembangan Perbankan	41
2.1.	Bank Umum	42
2.1.1.	Jumlah Bank dan Jaringan Kantor	42
2.1.2.	Perkembangan Aktiva	44
2.1.3.	Risiko Kredit	44
2.1.3.1.	Perkembangan Penyaluran Kredit	45
2.1.3.2.	Konsentrasi Kredit	46
2.1.3.3.	Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru	48
2.1.3.4.	Kualitas Kredit	49
2.1.3.5.	Intermediasi Perbankan	51
	a. Perkembangan LDR	51
	b. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	52
2.1.4.	Risiko Likuiditas	54
2.1.4.1.	Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga	54
2.1.4.2.	Rasio Alat Liquid	57
2.1.5.	Profitabilitas	59
2.1.5.1.	Spread Bunga	59
2.1.5.2.	Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga	60

2.1.5.3.	Perkembangan Laba Rugi	61
2.2.	Bank Perkreditan Rakyat	62
2.3.	Bank Syariah	62
3.	Perkembangan Sistem Pembayaran	64
3.1.	Perkembangan Alat Pembayaran Tunai	65
3.1.1.	Aliran Uang Masuk/Keluar	65
3.1.2.	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	66
3.1.3.	Uang Palsu	66
3.2.	Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai	67
3.1.1.	Kliring	67
3.1.2.	Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)	67
3.3.	Perkembangan Kegiatan Pedangan Valuta Asing	68
3.4.	Strategi <i>Cash Centre</i> di Indonesia	69
BOKS	Manfaat Biro Informasi Kredit Bagi Optimalisasi Fungsi 3. Intermediasi Perbankan	
BAB 4.	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	70
Daftar Istilah		ix

## HALAMAN

Tabel. 1.1	Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan Triwulanan 2004 – 2005	10
Tabel. 1.2	Struktur Ekonomi Riau Menurut Komponen Penggunaan Triwulanan Tanpa Migas	12
Tabel. 1.3	Struktur Ekonomi Riau Dengan Migas Menurut Komponen Penggunaan Triwulanan	13
Tabel. 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas	15
Tabel. 1.5	Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas Triwulan	15
Tabel. 1.6	Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas Triwulanan	18
Tabel. 1.7	Struktur Ekonomi Riau Dengan Migas Triwulann	19
Tabel. 1.8	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN di Propinsi Riau	20
Tabel. 1.9	Perkembangan Nilai Investasi PMDN Menurut Kabupaten	21
Tabel. 1.10	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA di Propinsi Riau	21
Tabel. 1.11	Perkembangan Nilai Investasi PMA Menurut Kabupaten	22
Tabel. 1.12	Perkembangan Nilai Investasi PMA Menurut Sektor	22
Tabel. 1.13	Peringkat Realisasi Investasi PMDN dan PMA menurut Lokasi	23
Tabel. 1.14	Belanja Daerah Propinsi Riau Menurut Kelompok dan Jenis Belanja Tahun 2007	24
Tabel. 1.15	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Menurut Pemerintah Daerah dan Organisasi TA 2007	25
Tabel. 1.16	Perkembangan Ekspor – Impor Propinsi Riau Daratan	27
Tabel. 1.17	Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau	27
Tabel. 1.18	Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Negara Pembeli	29
Tabel. 1.19	Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau	30
Tabel. 1.20	Impor Non Migas Menurut Negara Penjual	31
Tabel. 1.21	Nilai Ekspor Non Migas Prop Riau menurut Valuta dan Cara Pembayaran	31

Tabel. 1.22	Nilai Impor Non Migas Prop Riau menurut Valuta dan Cara Pembayaran	32
Tabel. 2.1	Indeks Harga dan Perubahannya Menurut Kelompok Barang dan Jasa	34
Tabel. 2.2	Sumbangan Kelompok Barang dan Jasa Terhadap Inflasi	35
Tabel. 2.3	Perkembangan 10 Komoditas yang Mengalami Laju Inflasi Tertinggi	36
Tabel. 2.4	Laju Inflasi Kota Pekanbaru dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran	36
Tabel. 3.1	Perkembangan Lembaga Bank di Propinsi Riau	42
Tabel. 3.2	Peta Perbankan Propinsi Riau	43
Tabel. 3.3	Data ATM Perbankan Per Kabupaten/Kota di Propinsi Riau	43
Tabel. 3.4	Posisi Kredit di Propinsi Riau	45
Tabel. 3.5	Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II Propinsi Riau	48
Tabel. 3.6	Persetujuan Kredit Baru di Propinsi Riau	49
Tabel. 3.7	NPLs Per Sektor Ekonomi di Propinsi Riau	51
Tabel. 3.8	NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Propinsi Riau	51
Tabel. 3.9	Perkembangan Kredit UMKM di Propinsi Riau	53
Tabel. 3.10	Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Propinsi Riau	53
Tabel. 3.11	Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Propinsi Riau	54
Tabel. 3.12	Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Propinsi Riau	55
Tabel. 3.13	Posisi Dana Perbankan Menurut Kelompok Bank & Jenis Simpanan di Propinsi Riau	55
Tabel. 3.14	Sebaran DPK Menurut Kepemilikan di Propinsi Riau	56
Tabel. 3.15	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten di Propinsi Riau	57
Tabel. 3.16	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Propinsi Riau	57
Tabel. 3.17	Perkembangan Alat Likuid dan Non Core Deposit	58
Tabel. 3.18	Perkembangan Usaha BPR/BPRS di Propinsi Riau	62
Tabel. 3.19	Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS di Propinsi Riau	63
Tabel. 3.20	Indikator Kinerja Utama Bank Umum Syariah di Propinsi Riau	64
Tabel. 3.21	Perkembangan Kliring di Propinsi Riau	67
Tabel. 3.22	Perkembangan Transaksi RTGS	68

Tabel. 3.23	Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing	68
-------------	---	----

## DAFTAR

## GRAFIK

		HALAMAN
Grafik 1.1.	Perkembangan PDRB Triwulanan Riau 2005	9
Grafik 1.2.	Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan (Triwulanan )	12
Grafik 1.3.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral tanpa Migas	17
Grafik 1.4.	Struktur Ekonomi Riau Sektoral dengan Migas	19
Grafik 1.5.	Perkembangan Posisi Gabungan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota Riau	26
Grafik 1.6.	Ekspor Non Migas Komoditi Terpilih Provinsi Riau	28
Grafik 1.7.	Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Pembeli	29
Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru	33
Grafik 2.2.	Perkembangan Komponen-komponen Inflasi	37
Grafik 2.3.	Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru	38
Grafik 3.1.	Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Propinsi Riau	41
Grafik 3.2.	Perkembangan Aktiva Perbankan Propinsi Riau	44
Grafik 3.3.	Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Propinsi Riau	46
Grafik 3.4.	Jumlah Undisbursed Loans Perbankan di Propinsi Riau	49
Grafik 3.5.	Perkembangan NPLs Gross di Propinsi Riau	50
Grafik 3.6.	Perkembangan LDR di Propinsi Riau	52
Grafik 3.7.	Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit	58
Grafik 3.8.	Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito	59
Grafik 3.9.	Komposisi Pendapatan Bunga	60
Grafik 3.10.	Komposisi Beban Bunga	61
Grafik 3.11.	Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan)	62
Grafik 3.12.	Perkembangan Kas Inflow dan Outflow	65

## RINGKASAN

## EKSEKUTIF

**MEMASUKI** triwulan I 2007, perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Sumber penguatan tersebut ditopang oleh aktivitas investasi dan ekspor. Dalam triwulan laporan, laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41% (yoy), atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 7,05% (yoy). Laju pertumbuhan ekonomi di Riau tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya mencapai 5,4% (yoy). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dengan migas mencapai angka sebesar 4,46%, atau sedikit melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yaitu sebesar 4,75%.

Seiring dengan semakin kondusifnya iklim dunia usaha di Riau, meningkatnya kegiatan investasi memberikan kontribusi yang dominan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I-2007 dengan pangsa sebesar 24.51% terhadap total PDRB. Disamping maraknya kegiatan investasi, aktivitas ekspor (gross) juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. Sebagai gambaran aktivitas ekspor tanpa migas (gross) pada triwulan I-2007 tercatat Rp.4,62 triliun atau tumbuh 6,67% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan ekspor dengan migas (gross) pada triwulan I-2007 mencapai Rp.12.80 triliun atau tumbuh 4,27%. Pada triwulan laporan aktivitas ekspor migas tersebut memberikan kontribusi sebesar 54,92% terhadap total PDRB Riau (gross).

Membbaiknya kinerja investasi tersebut, memang sejalan dengan meningkatnya permintaan eksternal terhadap berbagai komoditi unggulan di Riau. Naiknya daya beli masyarakat yang tercermin

dari cukup tingginya pertumbuhan nilai konsumsi (baik masyarakat perorangan/swasta maupun pemerintah) pada akhirnya semakin menggairahkan iklim investasi tersebut. Naiknya daya beli masyarakat Riau tersebut juga tercermin dari hasil survey triwulan I-2007 yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pekanbaru.

Nilai konsumsi pada triwulan I-2007 tercatat sebesar Rp.16.56 triliun atau naik tajam sebesar 25,37% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Aktivitas konsumsi tersebut memberikan kontribusi sebesar 61.59% dari total nilai PDRB Riau pada triwulan I-2007.

Ekspansi ekonomi tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik (*Domestik Demand*) dan tentunya untuk menjaga *sustainability* dari *economic growth* tersebut perlu didukung pula dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai dari dunia perbankan. Untuk itu, dimasa mendatang peran Bank Indonesia di daerah akan semakin besar baik sebagai mediator maupun sebagai katalisator dalam menggerakkan roda perekonomian daerah terutama dari peranannya sebagai regulator dunia perbankan di daerah.

Apabila kita lihat per sektor, perkembangan yang menggembirakan tersebut ditopang oleh 3 (tiga) sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor tersier (perdagangan, pengangkutan dan keuangan) dengan kontribusi masing-masing sebesar 38,64%, 30,55% dan 24,70% terhadap total PDRB Riau.

Pada triwulan laporan sektor industri pengolahan dan sektor tersier mengalami pertumbuhan yang cukup fantastis di atas 8%, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor keuangan dengan laju pertumbuhan sebesar 11,83%. Diikuti oleh sektor pengangkutan dengan laju pertumbuhan sebesar 9,19% dan sektor perdagangan dengan laju pertumbuhan sebesar 8,69%. Sedangkan industri pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang cukup fantastis yaitu sebesar 9,52%.

Karakteristik tersebut sekaligus membuktikan bahwa perekonomian Riau pada saat ini memang sedang memasuki fase

ekspansi yang cukup pesat dengan menjadikan sektor industri sebagai sumber pertumbuhan utama dan ditopang pula dengan sektor tersier /jasa-jasa keuangan & perdagangan sebagai stimulus pertumbuhan sektor industri tersebut.

Ini berarti perekonomian Riau sedang mengalami metamorfosis menjadi propinsi yang berbasis industri pengolahan, namun diharapkan proses industrialisasi tersebut juga terjadi di sektor pertanian yang pada saat ini tingkat mekanisasinya masih relatif rendah, Hal ini tergambar dari pertumbuhan sektor pertanian yang masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 4,27% pada triwulan I-2007, walaupun notabene dari segi pangsa relatif sangat dominan yaitu sebesar 38,64% dari total PDRB Riau. Artinya sektor pertanian di Riau sangat membutuhkan proses industrialisasi agar produktifitas dan pertumbuhannya dapat ditingkatkan di masa mendatang. Program revitalisasi sektor pertanian merupakan salah satu jawaban ke arah tersebut.

Disisi lain, kemajuan yang dicapai pada ekonomi makro tersebut juga telah diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Jika pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Riau mencapai 14,67%, maka pada tahun 2006 prosentasenya telah mengalami penurunan menjadi 13,34% (Riau dan Kepulauan Riau).

Begitu pula dengan jumlah pengangguran terbuka yang pada akhir tahun 2006 mencapai 12,57% dari jumlah penduduk atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2004 yang prosentasenya mencapai 14,67%.

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan data dari website Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Promosi Investasi (BPI) propinsi Riau, dalam triwulan laporan, terdapat 2 (dua) proyek PMDN yang telah disetujui yaitu sebesar Rp.124,4 miliar, sedangkan realisasi tercatat sebesar Rp.1.867,8 miliar.

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMDN menurut kabupaten/kota di propinsi Riau, terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru

maupun perluasan proyek yaitu Rokan Hilir sebesar Rp.115 miliar sedangkan Kampar sebesar Rp.9,4 miliar.

Selanjutnya, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Propinsi Riau sepanjang triwulan laporan terdapat 4 (empat) proyek yang telah disetujui dengan total nilai investasi sebesar US\$1,952 juta yang menyerap tenaga kerja sebanyak 10.802 orang. Sedangkan realisasi PMA selama triwulan laporan sebanyak 3 (tiga) proyek dengan nilai investasi sebesar US\$392.5 juta yang menyerap tenaga kerja sebanyak 254 orang.

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMA menurut kabupaten/kota di propinsi Riau, terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru yaitu Pekanbaru dan Dumai. Sementara persetujuan perluasan investasi terdapat pada 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Pelalawan dan Siak. Sedangkan investasi PMA yang disetujui alih status terdapat pada 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Rokan Hilir dan Pekanbaru.

Ditinjau dari perkembangan nilai investasi PMA menurut sektor di propinsi Riau, terdapat 2 (dua) sektor yang merupakan persetujuan investasi PMA baru yaitu industri kimia dan perdagangan, sedangkan persetujuan perluasan investasi PMA terdapat pada 3 (tiga) sektor yaitu industri kertas, industri kimia dan industri lainnya. Sementara sektor yang mengalami alih status terdapat pada 4 (empat) sektor yaitu perkebunan, industri makanan, perdagangan dan jasa lainnya.

Secara nasional, sampai dengan akhir triwulan I-2007 propinsi Riau menempati urutan ke 4 dalam realisasi PMDN dengan jumlah proyek 5 senilai Rp.1.867.8 miliar atau dengan memberikan kontribusi sebesar 13,7%, sedangkan realisasi PMA menempati urutan ke 3 dengan jumlah proyek 3 senilai US\$392.5 juta dengan pangsa 13.1%.

Apabila kita tinjau kinerja keuangan pemerintah daerah, jumlah dana APBD diseluruh Riau mencapai Rp.19,99 triliun (seluruh kabupaten dan kota). Jumlah ini naik lebih dari 48% dari total APBD tahun lalu sebesar Rp.13,44 triliun.

Khusus untuk propinsi Riau, total Anggaran Pendapatan tahun 2007 meningkat sebesar Rp.0,47 triliun atau sebesar 14,88% menjadi Rp.3,65 triliun. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah naik sebesar Rp.0,52 triliun atau 14,11% menjadi Rp.4,19 triliun. Sehingga secara keseluruhan kondisi APBD Riau mengalami defisit sebesar Rp.0,54 triliun yang dibiayai dengan sisa anggaran tahun sebelumnya.

Sementara itu, total dana pemerintah daerah yang ada diperbankan cenderung mengalami peningkatan, dimana pada bulan Januari sampai dengan maret 2007 posisinya tercatat sebesar Rp.8.717,76 miliar atau naik sebesar 63%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp.5.345,04 miliar.

Kondisi tersebut dapat merefleksikan adanya dana pemda yang *idle* diperbankan. Kondisi tersebut antara lain dapat disebabkan oleh lambatnya realisasi anggaran oleh pemda sehingga kondisi tersebut dapat membawa implikasi pada terlambatnya pembangunan proyek-proyek pemerintah. Keterlambatan realisasi tersebut diperkirakan juga disebabkan oleh adanya tahap konsolidasi penyusunan anggaran akibat terjadinya perubahan sistem yang notabene juga menyangkut pada kesiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan sistem yang baru tersebut.

Walaupun net ekspor non migas masih mencatat saldo positif, namun secara keseluruhan kinerja perdagangan luar negeri Propinsi Riau pada triwulan I - 2007 cenderung mengalami penurunan. Walaupun neraca perdagangan daerah (*trading account*) mencatat surplus sebesar USD 560,49 juta, namun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 759,15 juta. Secara nominal memang terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 21,36% menjadi USD 1.087,70 juta, namun nilai impor meningkat jauh lebih besar lagi sebesar 285,54 menjadi USD 527,21 juta.

Adanya peningkatan aktivitas impor tersebut terutama disebabkan oleh tingginya nilai impor kelompok barang modal berupa mesin industri tertentu dengan nilai sebesar USD

258,08 juta atau 48,95% dari total impor. Kondisi ini naik tajam dibandingkan dengan triwulan I 2006 sebesar USD 40,80 juta (pangsa 29,76%). Cukup tingginya nilai impor mesin tersebut memang sejalan dengan proses pembangunan/investasi yang sedang *booming* saat ini di Riau misalnya dengan adanya pembangunan industri kertas, pabrik pengolahan sawit & biodisel, pembangunan pembangkit listrik/proses peremajaan mesin pembangkit, dan lain-lain. Nilai investasi pada triwulan I - 2007 tercatat sebesar Rp6,59 triliun atau naik 16,40% dibanding nilai investasi pada triwulan I - 2006. Sebagai gambaran, pertumbuhan investasi yang cukup fantastis tersebut memberikan kontribusi sebesar 24,51% terhadap total PDRB Riau. Meningkatnya nilai impor juga dialami oleh kelompok mesin industri dan perlengkapannya dengan nilai ekspor sebesar USD 57,40 juta (pangsa 10,89%) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I 2006 sebesar USD 20,27 juta (14,78%). Kecenderungan semakin menguatnya nilai tukar rupiah terhadap USD dollar diperkirakan akan semakin memperburuk surplus perdagangan luar negeri Riau, karena penguatan nilai tukar rupiah tersebut dapat memperlemah daya saing komoditi ekspor daerah dan sekaligus memacu tingginya permintaan terhadap produk-produk substitusi impor.

Walaupun terdapat kecenderungan penurunan kinerja pada neraca perdagangan internasional akibat cukup tingginya lonjakan nilai impor, namun disisi lain lonjakan aktivitas impor ini relatif masih dapat diimbangi oleh aktivitas ekspor sehingga secara keseluruhan neraca perdagangan internasional masih mencatat surplus. Dalam hal ini kinerja ekspor tersebut perlu menjadi perhatian kita bersama agar daya saing komoditi unggulan Riau dapat lebih digali dan dikembangkan dimasa yang akan datang. Berdasarkan komoditinya terdapat 3 kelompok komoditi yang menjadi primadona produk ekspor tersebut antara lain adalah kelompok minyak dan lemak nabati (pangsa 55,57%), kelompok pulp dan kertas (pangsa 16,15%) dan kelompok kertas, karton dan olahannya (pangsa 17,72%). Sedangkan negara tujuan ekspor utama Singapura, Hongkong, Malaysia dan RRC.

Pada triwulan laporan, laju inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Pekanbaru mencapai 3,67% (q-t-q), meningkat

dibandingkan dengan IHK pada triwulan sebelumnya sebesar 3,34% (q-t-q), bahkan lebih tinggi juga dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,73%. Secara tahunan, inflasi IHK mencapai 9,42%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 14,80%. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau tercatat mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 6,24%; diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 4,93%; kelompok bahan makanan sebesar 4,00%; kelompok kesehatan sebesar 2,46%; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,03%; kelompok sandang sebesar 0,91%, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,43%. Sementara itu, dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kelompok barang dan jasa terhadap nilai konsumsi total, kelompok bahan makanan memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi, yaitu sebesar 1,19%, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,17%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,08%, kelompok kesehatan sebesar 0,09%, kelompok sandang sebesar 0,08%, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,06%, serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga memberikan sumbangan sebesar 0,05%.

Berdasarkan determinan, perkembangan komponen inflasi *volatile food* menunjukkan penurunan yang signifikan setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan *administered price* mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu komponen inflasi inti menunjukkan kecenderungan menurun. Laju inflasi *volatile food* mencapai 3,85% menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 11,03%. Sedangkan *administered price* mencapai 9,22%, meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,00%. Sementara itu, laju inflasi inti tercatat sebesar 1,20%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,39%.

Secara umum, kondisi moneter dan perbankan di Propinsi Riau mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi uang giral, kuasi dan Sertifikat Bank Indonesia sebagai indikator moneter (peredaran uang) mengalami penurunan.

Perkembangan perbankan diwarnai dengan penurunan aset karena turunnya dana pihak ketiga yang merupakan pemicu turunnya SBI. Terjadi peningkatan risiko kredit seiring dengan peningkatan penyaluran kredit. Sementara likuiditas perbankan juga mengalami penurunan, namun demikian likuiditas perbankan tersebut masih dalam posisi cukup aman. Dari sisi profitabilitas, dengan semakin tingginya *spread* terjadi peningkatan perolehan laba.

Turunnya posisi Dana Pihak Ketiga yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kredit perbankan merefleksikan semakin kondusifnya kondisi sektor riil dan iklim investasi di Propinsi Riau. Kondisi ini sekaligus juga dapat merefleksikan semakin meningkatnya daya beli masyarakat yang disinyalir digunakan untuk belanja konsumsi masyarakat (baik dari pihak swasta/perorangan maupun belanja konsumsi pemerintah). Hal ini semakin diperkuat dengan naiknya angka PDRB dari sisi konsumsi yang pada triwulan I tahun 2007 tercatat sebesar Rp.13.116.465 juta atau meningkat jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp.12.815.621 juta.

Sebagaimana diketahui, selama triwulan I - 2007 Bank Indonesia telah melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan BI rate sebesar 75 basis points (bps) menjadi 9,00. Penurunan tersebut sudah direspon oleh perbankan dengan penurunan suku bunga deposito dan kredit.

Namun demikian, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas penyaluran kredit perbankan, juga membawa tantangan tersendiri bagi perbankan untuk tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan lebih memperhatikan tingkat kolektibilitas dari kredit yang disalurkan tersebut. Pengelolaan risiko kredit tersebut menjadi semakin penting pada saat jumlah kredit yang bermasalah serta rasio NPLs cenderung semakin meningkat.

Perkembangan kegiatan pembayaran tunai pada periode laporan menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan triwulan IV- 2006. Hal ini disebabkan menurunnya permintaan masyarakat terhadap alat pembayaran pasca kegiatan

keagamaan dan kebijakan penerapan/implementasi kegiatan penyetoran dan pengambilan uang di Kantor Bank Indonesia.

Aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Pekanbaru pada triwulan laporan mengalami penurunan yaitu dari Rp3.569,63 miliar pada triwulan IV - 2006 menjadi Rp637,70 miliar pada triwulan I-2007. Demikian pula aliran uang kartal masuk (*inflow*) juga mengalami penurunan yaitu dari Rp771,16 miliar pada triwulan IV - 2006 menjadi Rp390,68 miliar pada triwulan laporan.

Dari sisi kegiatan pembayaran non tunai jumlah warkat yang dikliringkan pada periode laporan mencapai 234.908 lembar naik 8,29 % dibandingkan dengan triwulan IV - 2006 yang tercatat sebanyak 216.919 lembar. Dari sisi nominal kliring terjadi kenaikan sebesar 7,99 % yaitu dari Rp4.206.505 juta pada triwulan IV - 2006 menjadi Rp4.572.287 juta pada triwulan laporan. Sementara itu persentase penolakan cek dan bilyet giro kosong per hari pada periode laporan tercatat rata-rata 0,71% dari total warkat kliring atau rata-rata 0,60% dari total nominal kliring.

Masih dalam kaitannya dengan sistem pembayaran transaksi perbankan melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI RTGS)* di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dalam triwulan laporan mencapai Rp115,87 triliun, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp89,99 triliun.

Hingga periode laporan PVA yang melakukan kegiatan usaha diwilayah kerja KBI Pekanbaru tercatat 18 perusahaan, dengan nilai penjualan mencapai USD 3.196 ribu dan pembelian mencapai USD 3.196 ribu.

**TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF  
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN  
PROPINSI RIAU (DARATAN)**

INDIKATOR	2006				2007
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
<b>MAKRO</b>					
Laju Inflasi (q-t-q)	0.73%	0.89%	1.21%	3.34%	3.67%
Laju Inflasi (y-o-y)	14.80%	15.67%	13.75%	6.32%	9.42%
Inflasi Menurut Kelompok Barang & Jasa :					
- Bahan Makanan	-1.18%	0.95%	2.44%	7.96%	4.00%
- Makanan Jadi	1.98%	0.36%	0.75%	1.68%	6.24%
- Perumahan	1.65%	0.70%	0.78%	1.56%	4.93%
- Sandang	1.57%	3.68%	0.21%	2.70%	0.91%
- Kesehatan	3.31%	1.29%	3.08%	5.40%	2.46%
- Pendidikan	0.96%	0.00%	1.86%	0.08%	1.03%
- Transpor	0.30%	0.25%	-0.01%	0.06%	0.43%
Pertumbuhan PDRB (tanpa Migas)-(y-o-y) *	7.05%	7.51%	9.59%	10.40%	7.41%
Pertumbuhan PDRB (termasuk Migas)-(y-o-y) *	4.75%	4.71%	5.44%	5.69%	4.46%
Ekspor Non Migas (Juta USD) <sup>1)</sup>	896	1,902	3,132	4,496	1,088
Impor Non Migas (Juta USD) *)	137 *)	269	418	558	527
<b>MONETER</b>					
Posisi SBI (miliar Rp)	4,617.88	6,618.83	7,346.87	8,255.75	7,108.83
<b>PERBANKAN</b>					
Bank Umum	26	26	27	28	29
- Kantor Bank Pemerintah	156	168	170	182	197
- Kantor Bank Swasta	83	90	95	102	104
- ATM	263	271	277	296	304
BPR	14	15	15	15	15
Aktiva (miliar Rp) *)	23,724.29	28,310.7	28,527.1	31,829.2	31,509.5
Giro (miliar Rp)	7,372.54	9,729.24	10,329.62	12,165.80	11,165.54
Tabungan (miliar Rp)	6,660.96	6,966.43	7,298.51	9,163.03	8,625.26
Deposito (miliar Rp)	5,708.77	6,589.52	6,631.04	6,324.65	6,388.69
Total DPK (miliar Rp)	19,742.27	23,285.19	23,285.19	27,653.48	26,179.49
Kredit Umum Lokasi Proyek di Riau (miliar Rp)	18,569.61	19,238.38	19,149.18	21,898.60	20,096.77
Kredit Umum oleh Perbankan di Riau (miliar Rp)	12,500.79	13,105.54	13,303.04	13,854.84	14,002.44
UMKM (miliar Rp)	7,279.09	7,910.22	8,306.92	8,733.43	9,038.57
NPLs (%)	10.61%	10.38%	10.21%	5.20%	5.41%
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>					
Inflow (miliar Rp)	1,468.12	1,229.64	1,396.54	771.16	390.68
Outflow (miliar Rp)	1,990.82	2,504.08	2,856.38	3,569.63	637.70
PTTB (nominal)	34.02	91.53	191.55	258.40	94.16
RTGS :					
- Dari Pekanbaru	17,619.74	21,688.83	21,973.21	29,593.11	45,252.09
- Ke Pekanbaru	29,914.92	39,679.78	46,747.90	60,395.59	70,619.40
Jumlah Uang Palsu (lembar)	64	38	29	9	22
Volume Kliring (lembar)	277,930	282,747	259,144	216,919	234,908
Nominal Kliring (miliar Rp)	4,558.71	4,598.30	4,585.40	4,206.51	4,572.29
<b>KEUANGAN DAERAH</b>					
Posisi Gabungan Saldo Keu.Daerah - Pembiayaan (miliar Rp)	5,345.04	8,208.86	7,988.16	8,810.31	8,717.76

Keterangan :

1). Data Ekspor & Impor adalah data kumulatif

Sumber data dari Bagian PPDI - BI, Jakarta.

\*) Angka revisi

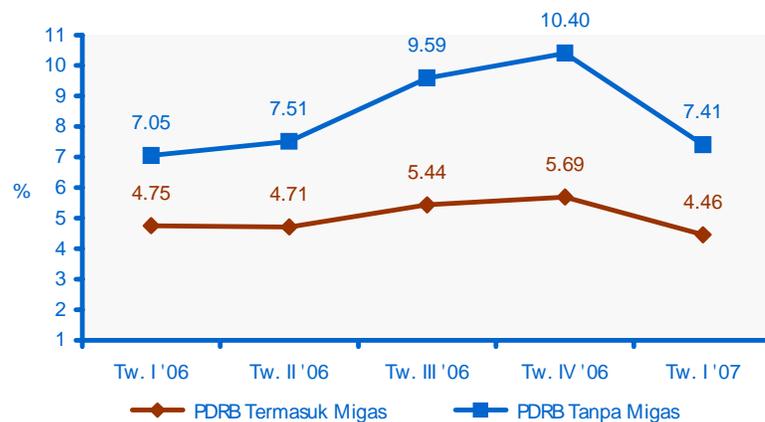
# Bab 1

## EVALUASI KONDISI EKONOMI

### MAKRO REGIONAL

**MEMASUKI** triwulan I 2007, perekonomian Riau terus mengalami penguatan. Sumber penguatan tersebut ditopang oleh aktivitas investasi dan ekspor. Dalam triwulan laporan, laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 7,41%, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 7,05%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dengan migas mencapai angka sebesar 4,46%, atau sedikit melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yaitu sebesar 4,75%.

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Riau Triwulanan (% , y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

### 1. PDRB dari Sisi Permintaan

### 1.1. PDRB Tanpa Migas

Dalam triwulan laporan, laju pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas mencapai 7,41%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 7,05%. Dari enam komponen pembentukan PDRB Propinsi Riau, terdapat satu komponen yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan yaitu konsumsi rumah tangga, sedangkan lima komponen lainnya yaitu konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, impor, dan ekspor mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Namun demikian mengingat pangsa konsumsi rumah tangga yang cukup besar dalam pembentukan PDRB, maka secara keseluruhan PDRB pada triwulan I-2007 tetap mengalami peningkatan laju pertumbuhan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Riau Tanpa Migas Menurut Penggunaan Triwulanan (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw I '06**)	Tw II '06**)	Tw III '06**)	Tw IV '06**)	Tw I '07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	7,14	7,61	8,23	7,93	7,71
	a. Makanan	7,31	7,87	8,24	8,06	6,59
	b. Non Makanan	7,05	7,47	8,23	7,87	8,30
2	Konsumsi Lembaga Swasta	10,41	10,77	12,18	11,22	10,22
3	Konsumsi Pemerintah	11,39	11,46	11,69	12,06	9,11
4	PM TB	10,21	8,88	9,21	9,34	10,17
5	Perubahan Stok	-51,00	-43,59	-52,76	-39,09	-1,55
6	Ekspor	12,36	12,66	11,47	8,92	6,67
	a. Antar Negara	12,23	12,89	11,86	9,30	6,66
	b. Antar Daerah	13,39	11,01	8,59	6,13	6,71
7	Impor	18,10	16,76	14,22	10,62	8,99
	a. Antar Negara	14,60	13,60	11,60	8,72	5,25
	b. Antar Daerah	20,62	19,02	16,06	11,95	11,56
	<b>Total</b>	<b>7,05</b>	<b>7,51</b>	<b>9,59</b>	<b>10,40</b>	<b>7,41</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : \*\*) angka sementara      \*\*\*) angka sangat sementara

Pada triwulan laporan, komponen **konsumsi rumah tangga** mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 7,71%. Pertumbuhan ini terkait dengan adanya penyesuaian gaji/upah karyawan swasta dan kenaikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga daya beli dan pengeluaran masyarakat meningkat.

Komponen **konsumsi lembaga swasta nirlaba** tumbuh sebesar 10,22%. Pertumbuhan pada komponen ini terkait dengan terjadinya berbagai bencana seperti banjir, longsor dan kebakaran yang terjadi di beberapa kabupaten/kota yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Disisi lain, partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan sosial budaya dengan mengadakan berbagai seminar dan pertukaran kebudayaan juga berdampak pada tingginya pertumbuhan komponen ini.

Komponen **konsumsi pemerintah** mengalami pertumbuhan sebesar 9,11%. Pendorong pertumbuhan pada komponen ini terkait dengan meningkatnya belanja pemerintah baik belanja modal maupun rutin. Pertumbuhan komponen **pembentukan modal tetap bruto** mencapai 10,17%. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal serta pemakaian mesin-mesin dan kendaraan yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah merupakan pendorong pertumbuhan pada komponen ini. Selanjutnya, komponen **impor** mengalami laju pertumbuhan sebesar 8,99%, sedangkan komponen ekspor tumbuh sebesar 6,67%.

Dilihat dari Struktur PDRB ekonomi Riau tanpa migas dari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi tertinggi yaitu mencapai 48,77%, yang didukung oleh peran konsumsi non makanan sebesar 32,29% dan konsumsi makanan sebesar 16,48%. Selanjutnya komponen ekspor memberikan kontribusi sebesar 42,26%, dan komponen impor sebesar 28,37%, sehingga terjadi net ekspor sebesar 13,89%.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 20,48%, yang antara lain dipengaruhi oleh adanya penanaman modal baru. Sementara komponen konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 12,32%, dan konsumsi lembaga swasta nirlaba memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar 0,50%.

Tabel 1.2. Struktur Ekonomi Riau Tanpa Migas Menurut Komponen Penggunaan Triwulanan (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw. I '06**)	Tw. II '06**)	Tw. III '06**)	Tw. IV '06**)	Tw. I '07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	47,22	47,64	49,69	50,80	48,77
	a. Makanan	15,96	16,13	17,23	17,45	16,48
	b. Non Makanan	31,26	31,51	32,45	33,34	32,29
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,50	0,49	0,50	0,50	0,50
3	Konsumsi Pemerintah	12,05	12,07	12,40	12,89	12,32
4	PM TB	19,20	19,31	20,21	21,49	20,48
5	Perubahan Stok	6,41	6,59	3,91	1,54	4,03
6	Ekspor	47,21	46,46	45,37	44,10	42,26
	a. Antar Negara	44,07	43,39	42,39	41,22	39,47
	b. Antar Daerah	3,14	3,07	2,98	2,89	2,79
7	Impor	32,59	32,55	32,08	31,32	28,37
	a. Antar Negara	14,28	14,16	13,90	13,54	12,25
	b. Antar Daerah	18,31	18,39	18,18	17,78	16,12
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

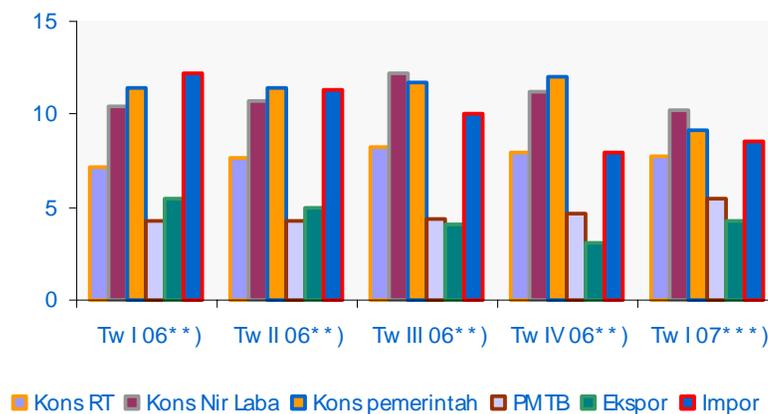
Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : \*\*) angka sementara      \*\*\*) angka sangat sementara

## 1.2. PDRB dengan Migas

Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencapai 5,46%. Peningkatan ini diperkirakan terkait dengan meningkatnya investasi peralatan dan infrastruktur dalam upaya pencarian sumur-sumur produksi baru di Pekanbaru, Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hilir.

Grafik 1.2. Pertumbuhan PDRB Riau Dengan Migas Menurut Penggunaan Triwulanan (% , y-o-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Dilihat dari struktur PDRB Propinsi Riau dengan migas menurut sisi penggunaan, kontribusi komponen PMTB mencapai 22,48%. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan investasi pada seluruh aktivitas perekonomian baik migas maupun non migas tergolong besar. Sementara komponen ekspor memberikan kontribusi sebesar 54,92%, dan komponen impor memberikan kontribusi sebesar 17,32%, sehingga kontribusi ekspor nettonya mencapai 37,60%. Selanjutnya komponen konsumsi rumah tangga juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu mencapai 27,77%. (lihat tabel 1.3.)

Tabel 1.3. Struktur Ekonomi Riau Dengan Migas Menurut Komponen Penggunaan Triwulanan (% , y-o-y)

No.	Komponen	Tw. I '06**)	Tw. II '06**)	Tw. III '06**)	Tw. IV '06**)	Tw. I '07***)
1	Konsumsi Rumah Tangga	27,33	27,13	28,20	28,49	27,77
	a. Makanan	9,24	9,19	9,78	9,79	9,38
	b. Non Makanan	18,09	17,95	18,42	18,70	18,38
2	Konsumsi Lembaga Swasta	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
3	Konsumsi Pemerintah	6,91	6,87	7,04	7,23	7,01
4	PM TB	23,94	23,41	23,27	23,27	22,48
5	Perubahan Stok	2,50	5,09	5,59	5,84	4,86
6	Ekspor	58,99	56,71	54,58	53,11	54,92
	a. Antar Negara	56,26	54,09	52,05	50,69	52,55
	b. Antar Daerah	2,73	2,63	2,53	2,42	2,37
7	Impor	19,95	19,50	18,97	18,22	17,32
	a. Antar Negara	9,43	9,01	8,63	8,24	8,11
	b. Antar Daerah	10,52	10,49	10,33	9,99	9,21
	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : \*\*) angka sementara      \*\*\*) angka sangat sementara

## 2. PDRB Dari Sisi Penawaran

### 2.1. PDRB Tanpa Migas

Pertumbuhan ekonomi Riau secara umum pada triwulan pertama tahun 2007 mencapai 7,41%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2006 yaitu sebesar 7,05%. Sektor **pertambangan dan penggalian** mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 25,28%. Hal ini disebabkan meningkatnya produksi batubara di Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu. Selanjutnya, sektor **Keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan** mencatat

pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sebesar 11,83%. Pertumbuhan sub sektor bank masih mendominasi pada sektor ini yaitu mencapai 20,69%. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran kredit.

Sektor **Industri Pengolahan** mengalami pertumbuhan sebesar 9,52%. Pertumbuhan yang cukup tinggi di sektor ini, seiring dengan meningkatnya produksi pada industri pabrik kelapa sawit, industri *pulp and paper*, serta industri garmen dan mebel.

Sektor **pengangkutan dan komunikasi** mencatat laju pertumbuhan sebesar 9,19%. Pertumbuhan sub sektor komunikasi masih merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 19,24%. Hal ini disebabkan meningkatnya pemakaian pulsa oleh pengguna telepon seluler. Sementara pertumbuhan di sektor pengangkutan mencapai 7,84%, sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penumpang baik angkutan darat, laut maupun udara.

Sektor **jasa-jasa** mengalami laju pertumbuhan sebesar 9,04%. Pertumbuhan di sektor ini sebagian besar akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk upah/gaji, insentif, dan penyusutan barang modal, serta meningkatnya jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga.

Sektor **perdagangan, hotel dan restoran** mengalami laju pertumbuhan mencapai 8,69%. Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh pertumbuhan pada sub sektor restoran sebesar 11,53%, sub sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 8,66%, dan sub sektor hotel sebesar 7,54%. Hal ini terkait dengan semakin bertambahnya pusat perdagangan serta meningkatnya daya beli masyarakat dan kegiatan perekonomian di propinsi Riau.

Sektor **bangunan** mencatat laju pertumbuhan sebesar 8,20%. Pertumbuhan di sektor ini merupakan dampak dari meningkatnya pembangunan konstruksi untuk perumahan, ruko maupun perkantoran, serta meningkatnya realisasi proyek pemerintah daerah seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Sektor **listrik dan air bersih** mengalami laju pertumbuhan sebesar 4,93%. Hal ini terkait dengan masih terbatasnya pengembangan pada sektor tersebut. Sementara, sektor **pertanian** mencatat pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,27%. Pertumbuhan di sektor ini dipengaruhi pada subsektor tanaman bahan makanan yang tumbuh sebesar 1,71% dan sub sektor kehutanan sebesar 1.09%. Rendahnya pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan disebabkan karena musibah banjir dan sempitnya lahan pertanian yang digunakan akibat perubahan fungsi lahan.

Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas  
Triwulanan (% , y-o-y)

No.	Sektor	Tw.I '06**)	Tw.II '06**)	Tw.III '06**)	Tw.IV '06**)	Tw.I '07***)
1	Pertanian	4.47	4.96	6.88	7.51	4.27
2	Pertambangan dan Penggalian	16.90	24.13	34.51	37.67	25,28
3	Industri Pengolahan	6,87	6,92	10,60	11,93	9,52
4	Listrik dan Air Bersih	5.54	4.96	6.68	6,25	4.93
5	Bangunan	5.64	7.75	8.98	10,64	8,20
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,97	11,20	11,43	11,54	8,69
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,39	8,68	10,33	11,00	9,19
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	13,53	11,87	16,41	20,61	11,83
9	Jasa-jasa	8,70	8,70	11,01	11,24	9,04
	<b>Total</b>	<b>7,05</b>	<b>7,51</b>	<b>9,59</b>	<b>10,40</b>	<b>7,41</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : \*\*) angka sementara      \*\*\*) angka sangat sementara

Dilihat dari struktur ekonomi Propinsi Riau sektoral tanpa migas, kontribusi sektor pertanian masih tetap yang terbesar yaitu mencapai 38,64%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 30,55%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 11,93%, jasa-jasa sebesar 5,93%, bangunan sebesar 4,32%, keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 3,56%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,28%, pertambangan dan penggalian sebesar 1,45%, dan kontribusi terendah terjadi pada sektor listrik dan air bersih yaitu sebesar 0,34%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas  
Triwulanan (% , y-o-y)

No.	Sektor	Tw I 06**)	Tw II 06**)	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)
1	Pertanian	38.17	38.42	38.49	38.03	38.64
2	Pertambangan dan penggalian	0.97	1.18	1.50	1.57	1.45
3	Industri Pengolahan	31.82	31.33	30.60	29.75	30.55
4	Listrik dan air bersih	0.36	0.36	0.35	0.36	0.34
5	Bangunan	4.31	4.27	4.49	4.86	4.32
6	Perdagangan, hotel dan restoran	11.41	11.55	11.74	12.40	11.93
7	Pengangkutan dan komunikasi	3.40	3.37	3.33	3.47	3.28
8	Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan	3.29	3.28	3.29	3.35	3.56
9	Jasa-jasa	6.27	6.24	6.20	6.21	5.93
Total		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : \*\*) angka sementara      \*\*\*) angka sangat sementara

Kontribusi sektor pertanian mencapai 38,64%, mengalami peningkatan terutama sebagai dampak dari pembukaan area penanaman perkebunan yang cukup luas. khususnya untuk komoditas kelapa sawit. Sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor kehutanan masih dominan memberikan sumbangan pada sektor pertanian. Kontribusi sub sektor tanaman perkebunan sebesar 20,08% terhadap total pembentukan PDRB Propinsi Riau, sedangkan sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 11,99%.

Sementara, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 30,55%. Peran beberapa perusahaan industri *pulp and paper* masih menjadi penopang utama perkembangan industri pengolahan di Riau, diikuti oleh peran industri makanan, minuman dan tembakau. Selain itu, mulai berkembangnya industri garmen dan mebel di Riau diharapkan akan meningkatkan kontribusi sektor industri dimasa mendatang.

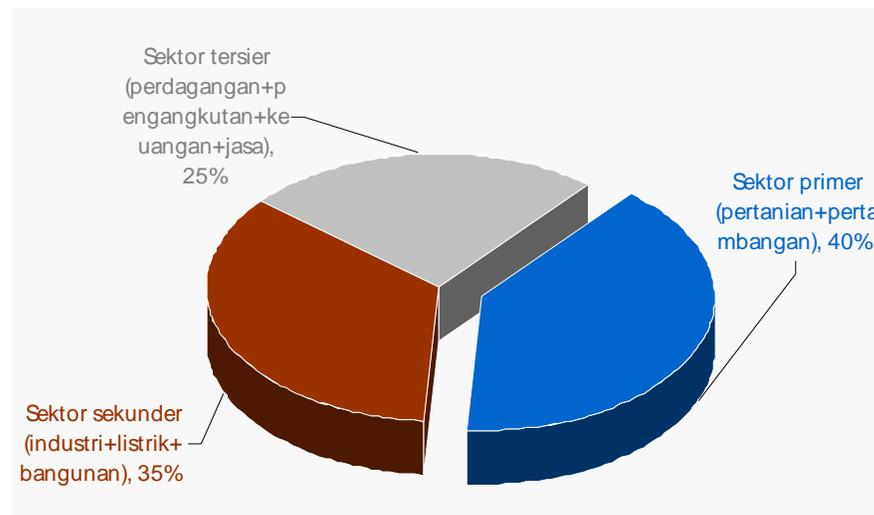
Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 11,93%. Peran subsektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi yaitu sebesar 11,02%. Kontribusi yang cukup besar ini terkait semakin pesatnya transaksi jual beli yang ditunjang oleh daya beli masyarakat yang relatif stabil terutama untuk pembelian produk tahan lama seperti kendaraan bermotor roda dua dan empat serta barang elektronik seperti TV, radio, komputer, dan telepon genggam.

Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 5,93%. Sektor ini terutama didukung oleh subsektor pemerintahan umum sebesar 4,47%. Kontribusi ini terutama dihasilkan melalui penciptaan nilai tambah khususnya berupa upah/gaji, insentif serta penyusutan yang relatif membaik. Sedangkan sektor bangunan yang merupakan penunjang infrastruktur sektor lainnya memberi kontribusi sebesar 4,32%

Selanjutnya, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 3,56%, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,28%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,45%. Kontribusi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diperoleh melalui tumbuhnya jasa penyewaan bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal seperti untuk perkantoran dan usaha, serta pengembangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sementara itu, kontribusi pada sektor pengangkutan dan komunikasi diperoleh dari sub sektor pengangkutan seperti bertambahnya armada angkutan darat, laut, dan udara serta peningkatan jaringan telepon seluler.

Kontribusi terendah terdapat pada sektor listrik dan air bersih yaitu sebesar 0,34%. Hal ini disebabkan masih terkendalanya dana dan investasi, sehingga pengelolaan sektor ini belum optimal.

Grafik 1.3. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Tanpa Migas  
Triwulan I 2007 (persen)



## 2.2. PDRB dengan Migas

Dalam triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi Riau dengan memasukkan unsur migas mencapai 4,46%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 4,75%. Sektor-sektor yang merupakan unsur migas yaitu sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,50%, mengalami perlambatan dibanding dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 3,47%. Selanjutnya pertumbuhan pada sektor industri pengolahan mencapai 7,43%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 sebesar 4,27%. Selengkapnnya dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas  
Triwulanan (% , y-o-y)

No.	Sektor	Tw I 06**)	Tw II 06**)	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)
1	Pertanian	4.47	4.96	6.88	7.51	4.27
2	Pertambangan dan Penggalian	3.47	2.96	2.68	2.53	2.50
3	Industri Pengolahan	4.27	5.16	8.27	9.35	7.43
4	Listrik dan Air Bersih	5.54	4.96	6.68	6.25	4.93
5	Bangunan	5.64	7.75	8.98	10.64	8.20
6	Perdagangan, Restoran dan Hotel	10.97	11.20	11.43	11.54	8.69
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8.39	8.68	10.33	11.00	9.19
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	13.53	11.87	16.41	20.61	11.83
9	Jasa-jasa	8.70	8.70	11.01	11.24	9.04
	<b>Total</b>	<b>4.75</b>	<b>4.71</b>	<b>5.44</b>	<b>5.69</b>	<b>4.46</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : \*\*) angka sementara      \*\*\*) angka sangat sementara

Dilihat dari struktur perekonomian Riau dengan memasukan unsur migas, maka sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 42,15%, dengan didominasi oleh peranan sub sektor pertambangan migas yaitu mencapai 41,32%. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian sebesar 22,00% dan sektor industri pengolahan sebesar 19,14% termasuk didalamnya subsektor industri migas sebesar 1,75%. Dengan demikian peranan kedua sub sektor yang merupakan unsur migas yaitu sub sektor pertambangan migas dan sub sektor industri migas masih mendominasi perekonomian propinsi Riau, yaitu mencapai 43,07%. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 6,79%,

sektor jasa-jasa sebesar 3,37%, sektor bangunan sebesar 2,46%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 2,03%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,87%, dan kontribusi terendah diberikan oleh sektor listrik & air bersih yaitu sebesar 0,20%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas  
Triwulanan (% , y-o-y)

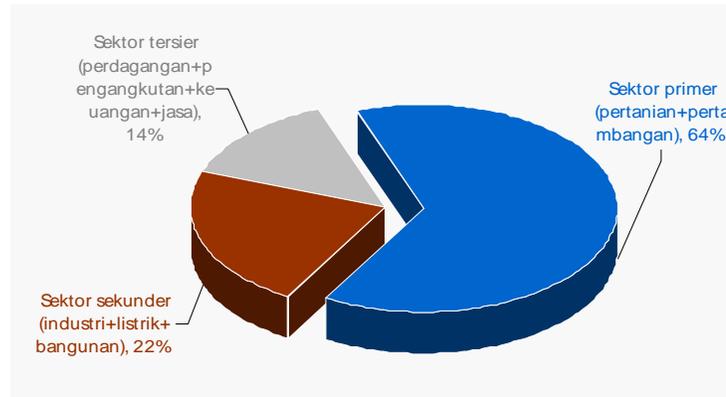
No.	Sektor	Tw I 06**)	Tw II 06**)	Tw III 06**)	Tw IV 06**)	Tw I 07***)
1	Pertanian	22.10	22.01	21.85	21.33	22.00
2	Pertambangan dan penggalian	41.86	42.00	42.26	43.03	42.15
	- Migas	41.30	41.33	41.41	42.14	41.32
	- Pertambangan Tanpa Migas	0.31	0.42	0.58	0.59	0.56
	- Penggalian	0.26	0.25	0.27	0.29	0.26
3	Industri Pengolahan	19.43	19.43	19.20	18.45	19.14
	- Industri Migas	1.84	1.96	1.83	1.76	1.75
	- Industri Tanpa Migas	17.59	17.47	17.37	16.69	17.39
4	Listrik dan air bersih	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
5	Bangunan	2.49	2.45	2.55	2.72	2.46
6	Perdagangan, hotel dan restoran	6.61	6.62	6.66	6.95	6.79
7	Pengangkutan dan komunikasi	1.92	1.90	1.89	1.94	1.87
8	Keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan	1.87	1.92	1.87	1.88	2.03
9	Jasa-jasa	3.52	3.47	3.52	3.48	3.37
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Riau

Keterangan : \*\*) angka sementara      \*\*\*) angka sangat sementara

Dilihat dari aktifitas ekonomi, sektor primer yang terdiri dari pertanian dan pertambangan memberikan kontribusi hingga 64,00%. Selanjutnya, sektor sekunder yaitu industri, listrik dan bangunan sebesar 22,00%. Sementara sektor tersier yang terdiri dari perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa hanya memberikan sumbangan sebesar 14,00%.

Grafik 1.4. Struktur Ekonomi Riau Sektoral Dengan Migas  
Triwulan (% , y-o-y)



### 3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

#### 3.1. Persetujuan dan Realisasi PMDN dan PMA

Berdasarkan data dari website Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan BPI propinsi Riau, dalam triwulan laporan terdapat 2 (dua) proyek Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah disetujui sebesar Rp.124.40 miliar, sedangkan realisasi tercatat sebesar Rp.1.867.80 miliar.

Tabel 1.8. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMDN di Propinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Rp Miliar)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2001	5,302.00	12	5,871	387.10	3	1,713
2002	1,606.10	8	7,438	0.00	0	0
2003	1,695.10	8	2,700	160.90	2	584
2004	3,469.40	12	5,707	86.10	2	703
2005	4,579.50	11	3,221	10,230.80	15	22,795
2006	20,898.20	6	3,006	2,501.00	10	13,486
2007 :						
Tw. I	124.40	2	268	1,867.80	5	NA

Sumber : BKPM dan BPI Propinsi Riau

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMDN menurut kabupaten/kota di propinsi Riau, terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru

maupun perluasan proyek yaitu Rokan Hilir sebesar Rp.115 miliar sedangkan Kampar sebesar Rp.9.4 miliar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9.

Tabel 1.9. Perkembangan Nilai Investasi FMDN Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Riau  
(1 Januari s.d. 31 Maret 2007)

No.	Sektor	BARU				PERLUASAN				ALIH STATUS				TOTAL				
		Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TNG. KERJA TKI	TKA	Pry	INV (Miliar Rp)	TENAGA KERJA TKI	TKA	Jumlah
1	Kuantan Sngingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Palalawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kampar	-	-	-	-	1	9.4	61	-	-	-	-	-	1	9.4	61	-	61
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rokan Hilir	1	115	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	115.0	207	-	207
6	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	115	207	-	1	9.4	61	-	-	-	-	-	2	124.4	268	-	268

Sumber : BPI Propinsi Riau

Selanjutnya, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Propinsi Riau dalam triwulan laporan terdapat 4 (empat) proyek yang telah disetujui dengan total nilai investasi sebesar US\$1,95 juta dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 10.802 orang. Sedangkan realisasi investasi PMA selama triwulan laporan terdapat 3 (tiga) proyek yang telah direalisasi dengan nilai investasi sebesar US\$392,5 juta dan menyerap tenaga kerja sebanyak 254 orang

Tabel 1.10. Perkembangan Persetujuan dan Realisasi PMA  
di Propinsi Riau

Tahun	PERSETUJUAN			REALISASI		
	Investasi (US\$ Juta)	Jumlah Proyek	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (US\$ Juta)	Jumlah Izin Usaha Tetap	Jumlah Tenaga Kerja
2001	1,070.70	15	6,371	197.60	3	211
2002	34.20	7	1,644	1.60	2	131
2003	1,032.40	8	1,635	80.20	4	6,264
2004	214.90	10	18,232	514.30	8	4,900
2005	179.70	9	4,142	795.80	8	2,831
2006	1,788.50	30	11,935	314.60	8	12,793
2007 :						
Tw. I	1,952	4	10,802	392.50	3	254

Sumber : BKPM dan BPI Propinsi Riau

Dilihat dari perkembangan nilai investasi PMA menurut kabupaten/kota di propinsi Riau, terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang memperoleh persetujuan investasi baru yaitu Pekanbaru dan Dumai. Sementara persetujuan perluasan investasi terdapat pada 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Pelalawan dan Siak. Sedangkan investasi PMA yang disetujui alih status terdapat pada 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Rokan Hilir dan Pekanbaru (lihat tabel 1.11).

Tabel 1.11. Perkembangan Nilai Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Riau  
(1 Januari s.d. 31 Maret 2007)

No.	Sektor	BARU			PERLUASAN			ALIH STATUS			TOTAL			
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA TKI TKA Jumlah	
1	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelalawan	-	-	-	1	168.7	158	-	-	-	1	168.7	158	158
5	Siak	-	-	-	3	1,696.0	6,150	-	-	-	3	1,696.2	6,150	6,150
6	Kampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	1	70.2	4,389	1	70.2	4,389	4,389
10	Pekanbaru	1	0.9	19	-	-	-	1	1.1	15	2	2.0	34	34
11	Dumai	1	15.0	71	-	-	-	-	-	-	1	15.0	71	71
	JUMLAH	2	15.9	90	4	1,864.7	6,308	2	71.3	4,404	8	1,952.1	10,802	10,802

Sumber : BPI Propinsi Riau

Selanjutnya, perkembangan nilai investasi PMA menurut sektor di propinsi Riau, terdapat 2 (dua) sektor yang merupakan persetujuan investasi baru yaitu industri kimia dan perdagangan. Sedangkan persetujuan perluasan investasi terdapat pada 3 (tiga) sektor yaitu industri kertas, industri kimia dan industri lainnya. Sementara sektor yang mengalami alih status terdapat pada 4 (empat) sektor yaitu perkebunan, industri makanan, perdagangan dan jasa lainnya. Selengkapanya dapat dilihat pada tabel 1.12.

Tabel 1.12. Perkembangan Nilai Investasi PMA Menurut Sektor di Propinsi Riau  
(1 Januari s.d. 31 Maret 2007)

No.	Sektor	BARU			PERLUASAN			ALIH STATUS			TOTAL			
		Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TNG. KERJA TKI TKA	Pry	INV (Juta US\$)	TENAGA KERJA TKI TKA	Jumlah
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perkebunan	-	-	-	-	-	-	1	64.6	3,960	-	1	64.6	3,960
3	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Industri Makanan	-	-	-	-	-	-	-	5.6	429	-	-	5.6	429
8	Industri Konveksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Industri Kertas	-	-	-	1	1,161.8	1,050	-	-	-	-	1	1,161.8	1,050
11	Industri Kimia	1	13.0	61	2	702.9	5,158	-	-	-	3	715.9	5,219	5,219
12	Industri Lainnya	-	-	-	1	0.2	100	-	-	-	2	0.2	100	100
13	Perdagangan	1	2.9	29	-	-	-	-	0.4	7	-	1	3.0	36
14	Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Perumahan Kaw. Ind.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	1	0.7	8	-	1	1.0	8
	JUMLAH	2	15.9	90	4	1,864.9	6,308	2	71.3	4,404	9	1,952.1	10,802	10,802

Sumber : BPI Propinsi Riau

### 3.2. Peringkat realisasi PMDN dan PMA

Dari seluruh propinsi di Indonesia realisasi investasi PMDN dan PMA, propinsi Riau pada tahun 2007 hingga posisi bulan Maret tahun 2007 telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Selama periode tersebut, propinsi Riau menempati urutan ke 4 dalam realisasi PMDN dengan jumlah proyek 5 senilai Rp1.867.8 miliar atau dengan kontribusi sebesar 13,7%. Sedangkan realisasi PMA menempati urutan ke 3 dengan jumlah proyek 3 senilai US\$392.5 juta dengan pangsa 13.1%. (lihat tabel 1.13)

Tabel.1.13 Peringkat Realisasi Investasi FMDN dan PMA Menurut Lokasi  
1 Januari - 31 Maret 2007

PMDN					PMA				
NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (Rp.Milyar)	%	NO	LOKASI	Proyek (Jumlah)	NILAI (US\$.Juta)	%
1	JAMBI	1	3,779.0	27.7	1	JAWA TIMUR	22	1,487.0	49.6
2	SULAWES TENGGARA	1	2,768.9	20.3	2	DKI JAKARTA	95	662.9	22.1
3	DKI JAKARTA	11	2,422.6	17.7	3	RIAU	3	392.5	13.1
4	RIAU	5	1,867.8	13.7	4	JAWA BARAT	55	200.1	6.7
5	JAWA TIMUR	4	672.4	4.9	5	BANTEN	19	86.4	2.9
6	SULAWES UTARA	1	623.3	4.6	6	KALIMANTAN TENGAH	1	32.3	1.1
7	SUMATERA UTARA	1	409.3	3.0	7	KEPULAUAN RIAU	9	32.1	1.1
8	JAWA BARAT	7	333.7	2.4	8	SUMATERA UTARA	4	30.3	1.0
9	KALIMANTAN TENGAH	1	280.9	2.1	9	LAMPUNG	2	24.3	0.8
10	BANTEN	7	231.5	1.7	10	SUMATERA SELATAN	1	13.5	0.4
11	KALIMANTAN TIMUR		102.9	0.8	11	JAWA TENGAH	11	10.9	0.4
12	KEPULAUAN RIAU	1	80.1	0.6	12	KALIMANTAN TIMUR	4	9.4	0.3
13	KALIMANTAN SELATAN		65.9	0.0	13	SULAWES UTARA	1	8.3	0.3
14	SULAWES TENGAH		23.7	0.2	14	BALI	14	7.4	0.2
15	BALI	1	3.1	0.0	15	KALIMANTAN SELATAN	2	1.2	0.0
	JUMLAH	41	13,665.1	100.0	16	SULAWES SELATAN	2	0.8	0.0
					17	PAPUA		0.7	0.0
					18	NUSA TENGGARA BARAT	1	0.1	0.0
						JUMLAH	246	3,000.2	100.0

Sumber : Website BKPM

#### 4. Keuangan Pemerintah Daerah

Apabila kita tinjau kinerja keuangan pemerintah daerah, jumlah dana APBD di seluruh Riau tahun 2007 mencapai Rp.19.99 triliun (seluruh kabupaten dan kota). Jumlah ini naik lebih dari 48% dari total APBD tahun lalu sebesar Rp.13,44 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau tahun 2007 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2006. Anggaran Pendapatan meningkat sebesar Rp.0,47 triliun atau sebesar 14,88% menjadi Rp.3,65 triliun. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah naik sebesar 0,52 triliun atau 14,11% menjadi Rp.4,19 triliun sehingga secara keseluruhan terdapat defisit anggaran sebesar 0,54 triliun yang dibiayai dengan menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya. (lihat tabel 1.13)

Tabel 1.14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau  
Tahun 2007

(Rp. Juta)

Komposisi APBD Riau	Anggaran 2007
<b>I. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3,646,197.12</b>
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	990,224.12
- Pajak Daerah	822,150.50
- Retribusi Daerah	32,096.71
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48,714.30
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	87,262.61
2. DANA PERIMBANGAN	2,635,973.00
- Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	2,358,314.00
- Dana Alokasi Umum	277,659.00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20,000.00
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah	20,000.00
<b>II. BELANJA DAERAH</b>	<b>4,187,692.06</b>
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,184,484.99
- Belanja Pegawai	500,085.01
- Belanja Bantuan Sosial	312,270.29
- Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa	325,479.69
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa	36,650.00
- Belanja Tidak Terduga	10,000.00
2. BELANJA LANGSUNG	3,003,207.07
- Belanja Pegawai	495,971.33
- Belanja Barang dan Jasa	726,294.26
- Belanja Modal	1,780,941.48
Defisit	(541,494.94)
<b>III. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>593,253.24</b>
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	799,489.37
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	799,489.37
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	206,236.13
- Pembentukan Dana Cadangan	100,000.00
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	67,090.00
- Pembayaran Pokok Utang	39,146.13
PEMBIAYAAN NETTO	593,253.24
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	51,758.30

Sumber : Biro Keuangan Propinsi Riau

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-100 tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 Propinsi Riau telah disempurnakan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau No.2 tahun 2007, sehingga untuk informasi realisasi anggaran tahun berjalan akan ditampilkan pada setiap semesteran.

Tabel 1.15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau  
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007

(Rp Juta)

NO.	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
I	<b>URUSAN WAJIB</b>	3,645,486.82	1,076,268.56	2,676,632.26	3,752,900.82
1	Pendidikan	0.00	37,468.32	506,160.09	543,628.41
2	Kesehatan	30,733.32	63,009.56	169,842.24	232,851.80
3	Pekerjaan Umum	525.00	39,245.74	880,627.09	919,872.83
4	Perumahan	0.00	0.00	29,822.63	29,822.63
5	Penataan Ruang	0.00	0.00	684.70	684.70
6	Perencanaan Pembangunan	0.00	8,105.34	27,373.01	35,478.35
7	Perhubungan	1,852.10	15,835.95	91,689.72	107,525.67
8	Lingkungan Hidup	0.00	5,004.13	11,224.48	16,228.61
9	Kependudukan dan Catatan Sipil	0.00	0.00	29,630.00	29,630.00
10	Pemberdayaan Perempuan	0.00	0.00	7,818.07	7,818.07
11	Sosial	0.00	11,356.01	19,518.60	30,874.61
12	Tenaga Kerja	0.00	15,507.87	39,091.59	54,599.46
13	Kopwerasi dan Usaha Kecil Menengah	0.00	6,767.15	12,018.43	18,785.58
14	Penanaman Modal	0.00	3,903.48	18,777.40	22,680.88
15	Kebudayaan	0.00	8,293.58	98,529.25	106,822.83
16	Pemuda dan Olah Raga	0.00	5,006.63	128,949.89	133,956.52
17	Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	2,724.47	20,235.77	22,960.24
18	Pemerintah Umum	3,612,376.40	826,378.89	530,850.51	1,357,229.40
19	Kepegawaian	0.00	10,917.33	21,097.30	32,014.63
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.00	5,249.32	16,338.90	21,588.22
21	Kearsipan	0.00	0.00	1,550.72	1,550.72
22	Kumunikasi dan Informatika	0.00	11,494.79	14,801.87	26,296.66
II	<b>URUSAN PILIHAN</b>	710.30	108,216.43	326,574.81	434,791.24
1	Pertanian	92.00	45,278.75	192,803.20	238,081.95
2	Kehutanan	0.00	20,042.55	25,298.56	45,341.11
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	0.00	7,346.23	31,121.92	38,468.15
4	Pariwisata	0.00	0.00	10,946.69	10,946.69
5	Kelautan dan Perikanan	46.30	7,832.97	39,135.21	46,968.18
6	Perdagangan	572.00	12,967.77	7,331.78	20,299.55
7	Perindustrian	0.00	0.00	13,330.54	13,330.54
8	Transmigrasi	0.00	14,748.16	6,606.91	21,355.07
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,646,197.12</b>	<b>1,184,484.99</b>	<b>3,003,207.07</b>	<b>4,187,692.06</b>

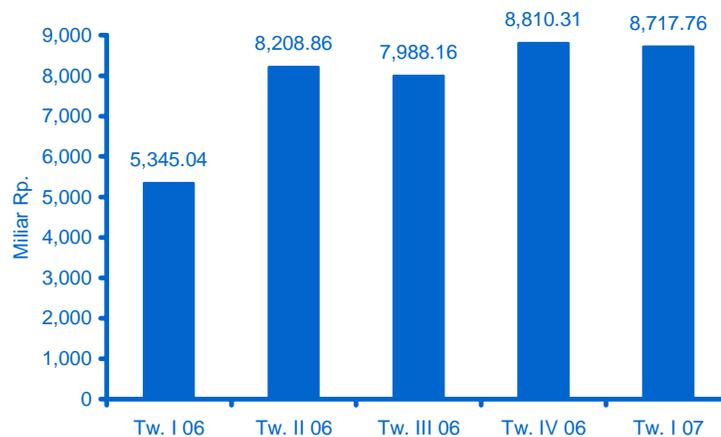
Sumber : Biro Keuangan Propinsi Riau

#### 4.1 Posisi Gabungan Keuangan Daerah (Propinsi dan Kabupaten / Kota) Pada Triwulan IV Tahun 2007

Keuangan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Riau pada tahun 2007 semakin meningkat, terutama berkaitan dengan meningkatnya penerimaan dari bagian dana bagi hasil sebagai dampak dari kenaikan harga migas di pasaran dunia, dan adanya sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya. Total dana pemerintah daerah yang ada di perbankan cenderung mengalami peningkatan dimana pada bulan Januari sampai dengan Maret 2007 posisinya tercatat sebesar Rp.8.717,76 miliar atau

naik sebesar 63 %, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp.5.345,04 miliar. Kondisi tersebut dapat merefleksikan adanya dana pemda yang *idle* diperbankan. Kondisi tersebut antara lain dapat disebabkan oleh lambatnya realisasi anggaran oleh pemda sehingga kondisi tersebut dapat membawa implikasi pada terlambatnya pembangunan proyek-proyek pemerintah. Keterlambatan realisasi tersebut diperkirakan juga disebabkan oleh adanya tahap konsolidasi penyusunan anggaran akibat terjadinya perubahan sistem yang notabene juga menyangkut pada kesiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan sistem yang baru tersebut.

Grafik 1.5. Perkembangan Posisi Gabungan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Riau



## 5. Perkembangan Ekspor-Import Non Migas

Ekspor dan impor non migas pada triwulan laporan (Januari - Maret 2007) meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah nilai ekspor non migas tercatat sebesar USD 1.087,70 juta naik 21,36% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Januari - Maret 2006) yang mencapai USD 896,25 juta. Kondisi yang sama juga terjadi pada jumlah nilai impor non migas, yaitu meningkat 390,11% dari USD 137,10 juta pada triwulan I 2006 menjadi USD 527,21 juta pada triwulan I 2007.

Tabel 1.16. Perkembangan Ekspor-Import Provinsi Riau Triwulan I 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

	Tw I 2006	Tw I 2007	Δ	% Δ
Ekspor	896.25	1,087.70	191.45	21.36
Import	137.10	527.21	390.11	284.54

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

### 5.1. Ekspor Non Migas

Jumlah nilai ekspor non migas Propinsi Riau pada triwulan laporan tercatat sebesar USD 1.087,70 juta atau naik sebesar USD 191,45 juta (21,36%) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi pada beberapa komoditas unggulan seperti minyak dan lemak nabati, kertas karton dan olahannya serta buah dan sayuran.

Tabel 1.17. Ekspor Komoditas Unggulan Propinsi Riau Triwulan I 2006 dan 2007 (Dalam jutaan USD)

No	Kelompok	Tw I 2006	%	Tw I 2007	%	Kenaikan (%)
1	Minyak dan Lemak Nabati	528.30	58.95	604.40	55.57	14.41
2	Pulp dan Kertas	185.33	20.68	175.67	16.15	-5.21
3	Kertas, Kertas Karton dan Olahannya	106.65	11.90	192.71	17.72	80.70
4	Olahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	16.01	1.79	41.31	3.80	158.02
5	Buah dan Sayuran	13.93	1.55	15.10	1.39	8.46
6	Batu Bara, Kokas dan Briket	11.36	1.27	7.75	0.71	-31.72
7	Lainnya	34.69	3.87	50.75	4.67	46.30
	<b>Total</b>	<b>896.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,087.70</b>	<b>100.00</b>	<b>21.36</b>

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Apabila dilihat berdasarkan kelompoknya terdapat 3 kelompok komoditi utama (primadona) yang memberikan kontribusi (pangsa) yang signifikan dalam menopang kinerja ekspor non migas di Riau yaitu kelompok minyak & lemak nabati (55,57%), kelompok pulp & kertas (16,15%) dan kelompok kertas, kertas karton dan olahannya (pangsa 17,72%).

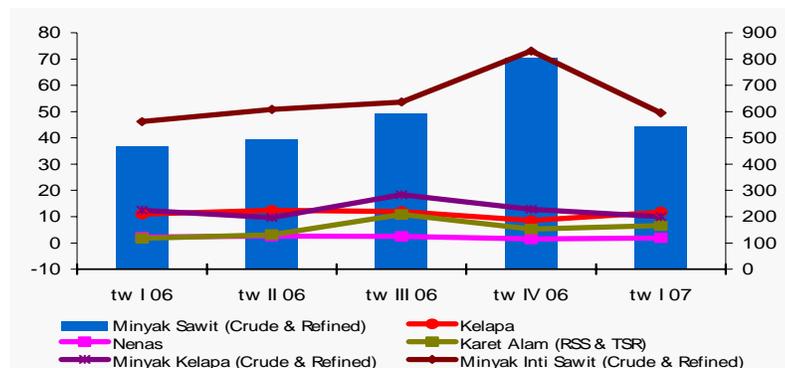
Pada triwulan laporan, kelompok kertas, kertas karton dan olahannya mencatat pertumbuhan yang sangat fantastis yaitu

mencapai 80,70% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor pulp dan kertas mengalami penurunan sebesar -5,21% dengan nilai sebesar USD175,67 juta.

Kedua kondisi di atas dapat merefleksikan adanya keinginan dari eksportir untuk menciptakan komoditi ekspor yang semula berorientasi pada komoditi mentah (*resources based*) menjadi komoditi ekspor yang berbasis industri (*industrial based*) sehingga proses penciptaan nilai tambah (*value added*) terhadap komoditi ekspor unggulan di Riau dapat semakin optimal. Kebijakan ekspor yang berbasis industri ini merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kinerja ekspor daerah di masa mendatang.

Ekspor kelompok minyak dan lemak nabati tercatat sebesar USD 604,40 juta atau naik 14,41% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Komoditas ini merupakan ekspor non migas terbesar Propinsi Riau pada triwulan I 2007 dan kondisi ini merupakan indikasi masih tingginya permintaan dunia terhadap minyak dan lemak nabati yang terdiri dari Minyak sawit (Crude & Refined), Minyak Inti Sawit (Crude & Refined) dan Minyak Kelapa (Crude & Refined). Ekspor Minyak Sawit pada periode laporan tercatat USD 544,86 juta, Minyak Inti Sawit tercatat USD 49,50 juta dan Minyak Kelapa tercatat sebesar USD 10,04 juta.

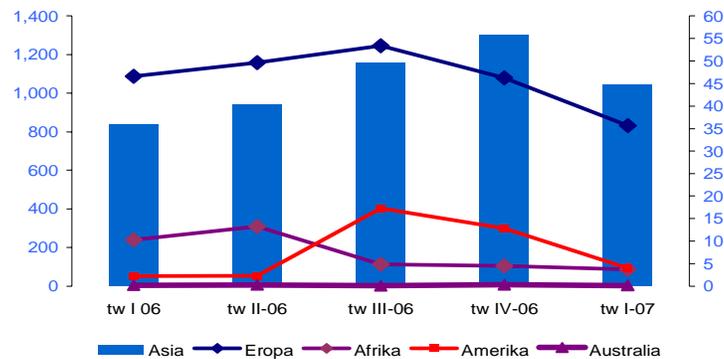
Grafik 1.6. Ekspor Non Migas Komoditi Terpilih Provinsi Riau  
(dalam juta USD)



Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu Ekspor kelompok buah dan sayuran masih tetap didominasi oleh ekspor kelapa dan nenas. Jumlah ekspor kelapa dan nenas pada triwulan laporan tercatat sebesar USD 13,63 juta atau 90,26% dari jumlah ekspor kelompok ini. Ekspor kelapa dan nenas ini naik 3,73% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 13,14 juta. Adapun negara tujuan utama ekspor komoditas kelapa yaitu Singapura dengan nilai ekspor tercatat sebesar USD 10,57 juta, sedangkan negara tujuan ekspor untuk komoditi nenas adalah Jepang dengan nilai ekspor tercatat sebesar USD 0,02 juta.

Grafik 1.7. Ekspor Non Migas Provinsi Riau Berdasarkan Negara Pembeli (dalam juta USD)



Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Negara-negara tujuan utama ekspor produk dari provinsi Riau adalah berasal dari benua Asia seperti Singapura, Hongkong, Malaysia, RRC (Tabel.1.17). Total nilai ekspor produk Provinsi Riau ke benua ini pada periode laporan tercatat sebesar USD 1.044,18 juta atau 96% dari jumlah nilai ekspor. Selebihnya tersebar di negara-negara lainnya di benua Afrika, Amerika Australia dan Eropa.

Tabel 1.18. Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli Triwulan I 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No	Negara	Tw I 2006	%	Tw I 2007	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapore	472.08	52.67	508.59	46.76	36.51	7.73
2	Hongkong	70.09	7.82	168.09	15.45	98.01	139.83
3	Malaysia	37.08	4.14	105.64	9.71	68.57	184.94
4	RRC	137.77	15.37	101.29	9.31	-36.48	-26.48
5	MEE	25.07	2.80	19.01	1.75	-6.06	-24.18
6	Francis	10.21	1.14	8.67	0.80	-1.54	-15.04
7	Lainnya	143.96	16.06	176.40	16.22	32.44	22.53
Total		896.25	100.00	1.087.70	100.00	191.45	21.36

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

## 5.2. Impor Non Migas

Impor non migas propinsi Riau di triwulan laporan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2006, yaitu dari USD 137,10 juta menjadi USD 527,21 juta atau meningkat sebesar 284,54 %. Impor terbesar di triwulan laporan yaitu mesin industri tertentu, yaitu 48,95 % dari jumlah impor. Disamping itu impor besi dan baja pada triwulan laporan mencapai USD 37,89 juta atau meningkat 1.472,16 % dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan permintaan Domestik (*Domestic Demand*) terhadap komoditi impor guna mendukung kegiatan dunia usaha/investasi di Riau. Peningkatan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki kinerja ekspor pada periode yang akan datang.

Tabel 1.19. Impor Komoditas Unggulan Propinsi Riau  
Triwulan I 2006 dan 2007 (dalam jutaan USD)

No	Komoditas	Tw I 2006	%	Tw I 2007	%	Kenaikan (%)
1	Mesin Industri Tertentu	40.80	29.76	258.08	48.95	532.60
2	Mesin Industri dan perlengkapannya	20.27	14.78	57.40	10.89	183.22
3	Besi dan Baja	2.41	1.76	37.89	7.19	1,472.16
4	Mesin Listrik, Aparat dan alat-alatnya	3.83	2.79	29.82	5.66	678.92
5	Pulp dan Kertas Bekas	6.23	4.54	21.97	4.17	252.61
6	Pupuk Kimia buatan pabrik	23.69	17.28	21.80	4.13	(7.98)
7	Lainnya	39.88	29.09	100.25	19.02	151.37
Total		137.10	100.00	527.21	100.00	284.54

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Negara asal barang impor utama adalah Singapura, Hongkong, Malaysia, Australia, Amerika Selatan dan negara Eropa lainnya. Pada triwulan laporan Singapura masih merupakan

negara asal barang impor terbesar yaitu sebesar USD 231,69 juta atau sebesar 43,95 % dari total impor.

Tabel 1.20. Impor Non Migas Menurut Negara Penjual Provinsi Riau  
Triwulan I 2006 dan 2007 (dalam juta USD)

No	Negara	Tw I 2006	%	Tw I 2007	%	Kenaikan	
						USD	%
1	Singapura	57.84	42.19	231.69	43.95	173.85	300.55
2	Hongkong	34.78	25.37	78.97	14.98	44.19	127.07
3	Australia	2.58	1.88	73.21	13.89	70.63	2736.45
4	Malaysia	12.55	9.15	36.53	6.93	23.98	191.14
5	Amerika Selatan	0.00	0.00	23.56	4.47	23.56	-
6	Negara Eropa lainnya	2.11	1.54	39.10	7.42	36.99	1753.88
7	Lainnya	27.24	19.87	44.14	8.37	16.90	62.04
Total		137.10	100.00	527.21	100.00	390.11	284.54

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

### 5.3. Nilai Ekspor Non Migas dan Impor Non Migas Menurut Valuta dan Cara Pembayaran

Berdasarkan jenis valuta yang diperoleh dari kegiatan ekspor non migas, valuta USD, EUR dan MYR merupakan yang terbesar. Tingginya penerimaan dalam valuta USD diperkirakan karena mata uang dimaksud bersifat *hard currencies*, atau dapat digunakan hampir diseluruh negara. Selain itu, seiring dengan meningkatnya ekspor ke negara-negara Eropa, perolehan hasil ekspor dalam mata uang Euro juga mengalami peningkatan.

Tabel.1.21. Nilai Ekspor Non Migas Propinsi Riau Menurut Valuta  
Dan Cara Pembayaran Periode Triwulan I 2006 & 2007  
(dalam juta USD)

No.	Valuta	Tw I 2006	Tw I 2007	No.	Cara Pembayaran	Tw I 2006	Tw I 2007
1	USD	887.44	1,066.45	1	Lainnya	436.87	457.28
2	IDR	4.67	8.20	2	Perhitungan Kemudian	235.23	271.65
3	EUR	0.73	7.54	3	Wesel Inkaso	126.58	182.02
4	SGD	1.25	0.79	4	Sight L/C	89.84	142.53
5	MYR	1.38	1.24	5	Pembayaran dimuka	7.66	22.10
6	CAD	0.72	1.51	6	Konsinyasi	0.07	0.13
7	GBP	0.04	1.95	7	Usance L/C	0.00	11.98
8	JPY	0.02	0.00				
		896.25	1,087.70			896.25	1,087.70

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Cara pembayaran ekspor non migas terbesar menggunakan Perhitungan Kemudian, (unsance L/C) yang telah mencapai USD 271,65 juta. Cara pembayaran seperti ini lazimnya diterima oleh perusahaan yang memiliki induk perusahaan di luar negeri. Cara pembayaran lainnya adalah Wesal Inkaso sebesar USD182,02 juta, *Sight L/C* sebesar USD 142,53 juta, pembayaran dimuka sebesar USD 22,10 juta, Konsinyasi sebesar USD 0,13 juta, *Usance L/C* sebesar USD11,98 juta dan lainnya USD 457,28 juta.

Tabel.1.22. Nilai Impor Non Migas Provinsi Riau Menurut Valuta Dan Cara Pembayaran Periode Triwulan I 2006 & 2007 (dalam juta USD)

No.	Valuta	Tw I 2006	Tw I 2007	No.	Cara Pembayaran	Tw I 2006	Tw I 2007
1	USD	128.12	511.98	1	Non L/C	120.48	514.89
2	EUR	3.35	8.21	2	L/C	16.62	12.32
3	MYR	1.89	4.00				
4	SGD	3.60	2.98				
5	Lainnya	0.14	0.04				
		137.10	527.21			137.10	527.21

Sumber : DSM Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu, kebutuhan valuta asing dalam rangka impor non migas propinsi Riau yang terbesar adalah valuta USD yaitu sebesar USD 511,98 juta (97,11%). Sedangkan cara pembayaran untuk impor non migas pada periode yang sama adalah *Non L/C* yaitu sebesar USD 514,89 juta dan *L/C* hanya sebesar USD 12,32 juta. Banyaknya penggunaan cara pembayaran *Non L/C* ini diperkirakan terjadi karena mitra dagang yang relatif sama setiap tahunnya dan telah berhubungan dalam jangka waktu yang panjang, maka cara pembayaran *Non L/C* dipandang sebagai cara yang praktis dilakukan dengan dasar saling percaya.

## PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN PROPINSI RIAU

Program revitalisasi perkebunan digulirkan pada pertengahan Desember 2006 dan bertujuan untuk mengembangkan sektor riil. Latar belakang dipilihnya sektor perkebunan karena sektor tersebut dianggap sebagai sumber devisa, bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan untuk tujuan pengembangan wilayah. Inti program revitalisasi perkebunan adalah pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Serta melibatkan perusahaan dibidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan, pengolahan dan pemasaran hasil kebun. Komoditi yang dikembangkan meliputi kelapa sawit, karet dan kakao, dengan pertimbangan komoditi tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan, mempunyai prospek pasar, mampu menyerap tenaga kerja dan mempunyai peranan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kontribusi kelapa sawit dan karet sumatera mencapai 83,78% dari total produksi sebesar 11,8 juta ton dengan share mencapai 72,21% dari total produksi sebesar 2.065.817 ton. Hal ini menggambarkan besarnya potensi yang dimiliki wilayah Sumatera khususnya Riau dalam pengembangan revitalisasi tersebut. Berkenaan dengan pembiayaan sektor tersebut 5 (lima) bank telah menyatakan komitmennya untuk mengucurkan kredit sebesar Rp.25,56 triliun untuk revitalisasi perkebunan hingga tahun 2010 yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bukopin, BPD Sumut, dan Bank Nagari.

Program revitalisasi perkebunan belum dilaksanakan di Propinsi Riau namun apabila dilaksanakan program ini sangat sesuai dengan kondisi Riau yang mempunyai lahan perkebunan relatif luas terutama kelapa sawit. Kontribusi sektor pertanian pada triwulan I - 2007 terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Riau yaitu mencapai 38,64 persen. Dari kontribusi tersebut 20,08% diantaranya disumbangkan oleh sektor perkebunan.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Riau tidak lepas dari besarnya kredit yang disalurkan perbankan di Riau kepada sektor ini. Kredit yang disalurkan perbankan di Riau mencapai Rp14 triliun. Dari jumlah tersebut 24,76 % atau Rp3,47 triliun disalurkan ke sektor pertanian. Dari jumlah tersebut 90,16 % atau Rp3,13 triliun disalurkan ke sektor perkebunan.

## Bab 2

### EVALUASI PERKEMBANGAN

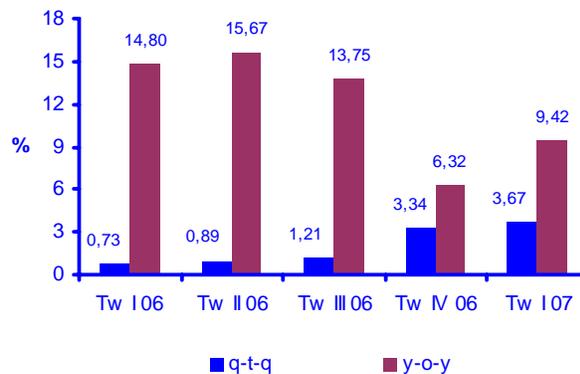
### INFLASI REGIONAL

DALAM triwulan laporan, Indeks Harga Konsumen (IHK) di kota Pekanbaru meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan periode yang sama tahun sebelumnya. Tekanan inflasi terutama karena meningkatnya permintaan barang dan jasa terkait dengan bencana alam yang terjadi pada triwulan sebelumnya dan triwulan laporan yang berakibat pada langkanya beberapa jenis bahan makanan dan terkendalanya distribusi pasokan barang.

#### 1. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru

Pada triwulan laporan, laju inflasi kota Pekanbaru sebesar 3,65% (q-t-q), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,34%, bahkan juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,73%. Namun demikian, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 9,42% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,80%.

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi di Kota Pekanbaru



Dalam triwulanan laporan, inflasi secara bulanan menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada bulan Januari terjadi Inflasi sebesar 2,73%, sedangkan pada bulan Februari mengalami inflasi sebesar 0,79%, dan pada bulan Maret mengalami inflasi sebesar 0,13%. Inflasi tertinggi yang terjadi pada bulan Januari terdapat pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang mencapai 5,65%. Adapun komoditas yang memberikan andil Inflasi antara lain minyak tanah (1,93%), kontrak rumah (0,06%), dan sewa rumah (0,05%). Kelangkaan minyak tanah di pasar menjadi pemicu inflasi pada komoditas minyak tanah. Selanjutnya, inflasi tertinggi yang terjadi pada bulan Februari terdapat pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau yang mencapai 3,95% dimana komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain rokok putih (0,16%), rokok kretek filter (0,41%) dan rokok kretek (0,15%). Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga eceran rokok (HEJ). Sementara itu, inflasi tertinggi yang terjadi pada bulan Maret terdapat pada kelompok bahan makanan yang mencapai 0,55%. Adapun komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain beras (0,28%), cabe merah (0,09%), ikan patin (0,07%), daging ayam ras (0,07%), teri (0,05%), dan jeruk (0,04%). Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat pada bulan Maret menimbulkan terganggunya distribusi/pasokan barang dan spekulasi pasar yang berakibat terjadinya kenaikan harga beberapa komoditas seperti beras, cabe, sayuran. Hal ini disebabkan karena sebagian komoditi tersebut berasal dari Sumatera Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indeks Harga dan Perubahannya Menurut Kelompok Barang & Jasa  
Triwulan I 2007

NO	KELOMPOK	Januari		Februari		Maret		Inflasi Tw I 07 (%)
		Indeks	Inflasi (%)	Indeks	Inflasi (%)	Indeks	Inflasi (%)	
I.	BAHAN MAKANAN	156,51	3,35	156,68	0,11	157,53	0,55	4,00
II.	MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	140,34	2,14	145,88	3,95	146,10	0,15	6,24
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	174,95	5,65	174,21	-0,43	173,69	-0,30	4,93
IV.	SANDANG	139,04	0,44	139,68	0,46	139,69	0,01	0,91
V.	KESEHATAN	142,78	0,20	145,68	2,03	146,01	0,23	2,46
VI.	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	147,80	0,04	149,26	0,98	149,26	0,00	1,03
VII.	TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	167,90	0,12	168,39	0,29	168,42	0,01	0,43
	UMUM	156,13	2,72	157,37	0,79	157,57	0,13	3,65

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka dalam triwulan laporan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tercatat mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 6,24%; diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 4,93%; kelompok bahan makanan sebesar 4,00%; kelompok kesehatan sebesar 2,46%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 1,03%; kelompok sandang 0,91%, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,43%.

Sementara itu, dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kelompok barang dan jasa terhadap nilai konsumsi total, kelompok bahan makanan memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi, yaitu sebesar 1,19%, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,17%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,08%, kelompok kesehatan sebesar 0,09%, kelompok sandang sebesar 0,08%, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,06%, serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga memberikan sumbangan sebesar 0,05%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sumbangan Kelompok Barang dan Jasa terhadap Inflasi Triwulan I 2007

No.	Kelompok Barang dan Jasa	Inflasi (%)	Sumbangan
1.	Bahan Makanan	4,00	1,19
2.	Makanan jadi, minumann rokok & tembakau	6,24	1,08
3.	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	4,93	1,17
4.	Sandang	0,91	0,08
5.	Kesehatan	2,46	0,09
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	1,03	0,05
7.	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,43	0,06
Umum		3,67	3,67

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut komoditi, sepuluh komoditi yang mengalami inflasi tertinggi adalah sebagai berikut : minyak tanah (67,62%), diikuti oleh bayam (49,71%), tomat sayur (46,83%), batu tela (33,10%), semangka (26,66%), kripik mentah (22,23%), alas bedak (21,90%), pir (21,30%), gado-gado (21,28%), dan daun bawang (19,15%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perkembangan 10 Komoditas yang Mengalami Laju Inflasi Tertinggi Triwulan IV 2006 dan Triwulan I 2007

Triwulan IV 2006			Triwulan I 2007		
No.	Komoditas	Inflasi (%)	No.	Komoditas	Inflasi (%)
1	Daun bawang	61,76	1	Minyak tanah	67,62
2	Cabe merah	57,75	2	Bayam	49,71
3	Seng	36,80	3	Tomat sayur	46,83
4	Cabe rawit	26,74	4	Batu tela	33,10
5	Telur puyuh	23,08	5	Semangka	26,66
6	Tomat sayur	17,14	6	Kripik mentah	22,23
7	Kacang tanah	16,28	7	Alas bedak	21,90
8	Sawi hijau	14,25	8	Pir	21,30
9	Sandal	13,71	9	Gado-gado	21,28
10	Beras	13,16	10	Daun bawang	19,15

Sumber : Badan Pusat Statistik

## 2. Perbandingan dengan Angka Inflasi Nasional

Laju inflasi di kota Pekanbaru pada triwulan laporan sebesar 3,67%, lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,91%. Faktor utama yang mempengaruhi lebih tingginya inflasi di kota Pekanbaru pada triwulan

laporan karena adanya gangguan distribusi barang dan jasa pasca gempa yang terjadi di Sumatera Barat, sehingga terjadi kenaikan harga terutama barang dan kebutuhan pokok seperti beras dan sayur-sayuran.

Tabel 2.4. Laju Inflasi Kota Pekanbaru dan Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2006 dan Tahun 2007

No.	Kelompok Barang dan Jasa	Tw I 2006		Tw I 2007	
		Pekanbaru (%)	Nasional (%)	Pekanbaru (%)	Nasional (%)
1.	Bahan Makanan	-1,18	4,59	4,00	3,68
2.	Makanan jadi, minumann rokok & tembakau	1,98	2,17	6,24	1,88
3.	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	1,66	1,61	4,93	1,80
4.	Sandang	1,57	1,60	0,91	0,72
5.	Kesehatan	3,30	1,85	2,46	1,38
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,96	0,04	1,03	0,36
7.	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,30	0,24	0,43	0,22
	Umum	0,73	1,97	3,67	1,91

Sumber : Badan Pusat Statistik

### 3. Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi di Kota Pekanbaru

Pada triwulan laporan, komponen inflasi *volatile food*<sup>1</sup> menunjukkan penurunan setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada triwulan sebelumnya, sedangkan *administered price*<sup>2</sup> mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara itu komponen inflasi inti menunjukkan kecenderungan menurun.

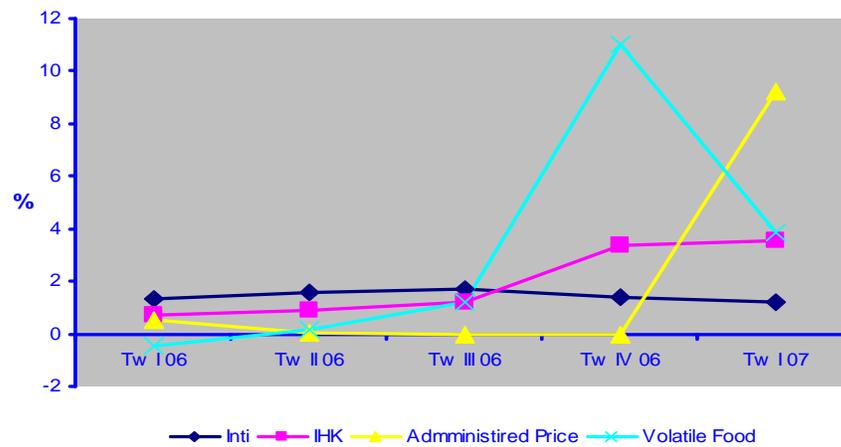
Laju inflasi *volatile food* pada triwulan laporan mencapai 3,85%, menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,03%. Diantara komoditas yang termasuk ke dalam jenis *volatile food* yang dominan memberikan andil terhadap inflasi, antara lain beras, cabe merah dan bayam.

<sup>1</sup> Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.

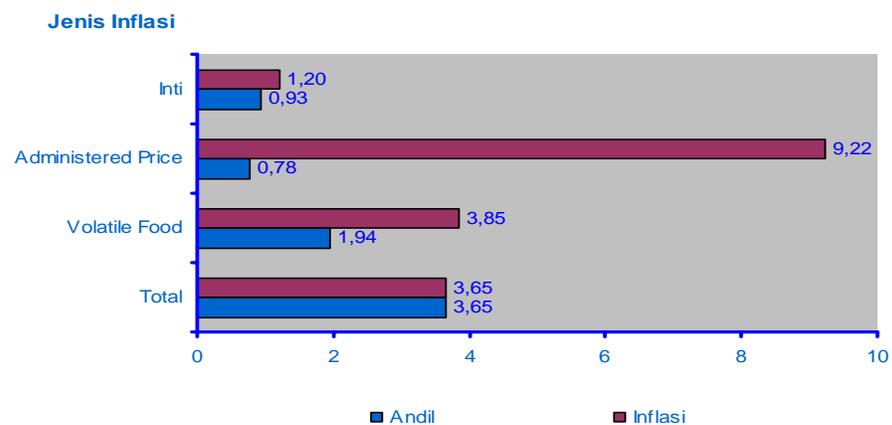
<sup>2</sup> Inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga pemerintah, seperti BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Selanjutnya laju inflasi *administered price* tercatat sebesar 9,22%, meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0.00%. Faktor pendorong inflasi tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga eceran rokok (HEJ) Sementara itu, laju inflasi inti tercatat sebesar 1,20%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,39%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain tomat sayur, kontrak rumah, dan sewa rumah.

Grifik 2.2. Perkembangan Komponen-Komponen Inflasi



Grifik 2.3. Disagregasi Inflasi di Kota Pekanbaru Triwulan I 2007



Krisis beras yang terjadi di Indonesia diperkirakan akan membuat propinsi Riau mengalami defisit beras sebanyak 350 ton pada tahun 2007. Gempa yang melanda Sumatera Barat, sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh pada stock pangan di daerah ini, karena kebutuhan pangan untuk propinsi Riau tidak semata-mata masuk dari daerah tersebut dan kebutuhan pangan yang masuk ke daerah Riau yang berasal dari Sumatera Barat sebagian besar adalah berupa sayur-sayuran. Dalam kondisi normal pasokan beras ke propinsi Riau adalah dari daerah penghasil seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan pulau Jawa yang masuk dan beredar di propinsi Riau setiap tahunnya mencapai 250 ribu ton. Sementara Bulog sendiri hanya mampu memasok sekitar 100 ribu ton per tahunnya. Sehingga total kebutuhan seluruhnya mencapai 350 ribu ton.

Persediaan beras di wilayah Propinsi Riau dipastikan masih cukup aman untuk 6 (enam) bulan mendatang, karena sejumlah daerah di Indonesia melakukan panen raya sehingga jumlah pasokan beras di Riau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Riau. Saat ini stock beras yang tersedia di gudang Bulog berjumlah 30 ribu ton. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya defisit beras, Bulog akan mengupayakan pasokan beras dari daerah penghasil terdekat yaitu Sumatera Barat, yang telah memasuki masa panen. Bulog mengharapkan Riau dapat menjadi prioritas utama untuk menerima hasil panen tersebut. Di samping itu, untuk menjaga ketahanan pangan di Propinsi Riau Bulog juga telah mendatangkan beras darinegara Vietnam sebanyak 55 ribu ton.

Ke depan, hendaknya Propinsi Riau sudah bisa berswasembada pangan, sehingga ketergantungan beras dari luar propinsi maupun luar negeri tidak terjadi lagi, karena Propinsi Riau sangat berpotensi untuk mengembangkan tanaman padi, apalagi masih terdapat lahan yang belum digarap atau lahan tidur.

## Bab 3

### PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN

### DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kondisi moneter dan Perbankan di propinsi Riau mengalami sedikit

**SECARA** umum, kondisi moneter dan perbankan di Propinsi Riau mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi uang giral, kuasi dan Sertifikat Bank Indonesia sebagai indikator moneter (peredaran uang) mengalami penurunan. Perkembangan perbankan diwarnai dengan penurunan aset karena turunnya dana pihak ketiga yang merupakan pemicu turunnya SBI. Terjadi peningkatan risiko kredit seiring dengan peningkatan penyaluran kredit. Sementara likuiditas perbankan juga mengalami penurunan, namun demikian likuiditas perbankan tersebut masih dalam posisi cukup aman. Dari sisi profitabilitas, dengan semakin tingginya *spread* terjadi peningkatan perolehan laba.

Turunnya posisi Dana Pihak Ketiga yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kredit perbankan merefleksikan semakin kondusifnya kondisi sektor riil dan iklim investasi di

Turunnya posisi Dana Pihak Ketiga yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kredit perbankan merefleksikan semakin kondusifnya kondisi sektor riil dan iklim investasi di meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kredit perbankan merefleksikan semakin kondusifnya kondisi sektor riil dan iklim investasi di Propinsi Riau. Kondisi ini sekaligus juga dapat merefleksikan semakin meningkatnya daya beli masyarakat yang disinyalir digunakan untuk belanja konsumsi masyarakat (baik dari pihak swasta/perorangan maupun belanja konsumsi pemerintah). Hal ini semakin diperkuat dengan naiknya angka PDRB dari sisi konsumsi yang pada triwulan I tahun 2007 tercatat sebesar Rp.13.116.465 juta atau meningkat jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp.12.815.621 juta.

Sebagaimana diketahui, selama triwulan I - 2007 Bank Indonesia telah melonggarkan kebijakannya dengan menurunkan BI

rate sebesar 75 basis points (bps) menjadi 9,00. Penurunan tersebut sudah direspon oleh perbankan dengan penurunan suku bunga deposito dan kredit.

Namun demikian, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas penyaluran kredit perbankan, juga membawa tantangan tersendiri bagi perbankan untuk tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan lebih memperhatikan tingkat kolektibilitas dari kredit yang disalurkan tersebut. Pengelolaan risiko kredit tersebut menjadi semakin penting pada saat jumlah kredit yang bermasalah serta rasio NPLs cenderung semakin meningkat.

Perkembangan kegiatan pembayaran tunai pada periode laporan menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan triwulan IV- 2006. Hal ini disebabkan menurunnya permintaan masyarakat terhadap alat pembayaran pasca kegiatan keagamaan dan kebijakan penerapan/implementasi kegiatan penyetoran dan pengambilan uang di Kantor Bank Indonesia.

Aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Pekanbaru pada triwulan laporan mengalami penurunan yaitu dari Rp3.569,63 miliar pada triwulan IV - 2006 menjadi Rp637,70 miliar pada triwulan I-2007. Demikian pula aliran uang kartal masuk (*inflow*) juga mengalami penurunan yaitu dari Rp771,16 miliar pada triwulan IV - 2006 menjadi Rp390,68 miliar pada triwulan laporan.

Dari sisi kegiatan pembayaran non tunai jumlah warkat yang dikliringkan pada periode laporan mencapai 234.908 lembar naik 8,29 % dibandingkan dengan triwulan IV - 2006 yang tercatat sebanyak 216.919 lembar. Dari sisi nominal kliring terjadi kenaikan sebesar 7,99 % yaitu dari Rp4.206.505 juta pada triwulan IV - 2006 menjadi Rp4.572.287 juta pada triwulan laporan. Sementara itu persentase penolakan cek dan bilyet giro kosong per hari pada periode laporan tercatat rata-rata 0,71% dari total warkat kliring atau rata-rata 0,60% dari total nominal kliring.

Masih dalam kaitannya dengan sistem pembayaran transaksi perbankan melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI RTGS)* di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dalam

triwulan laporan mencapai Rp115,87 triliun, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp89,99 triliun.

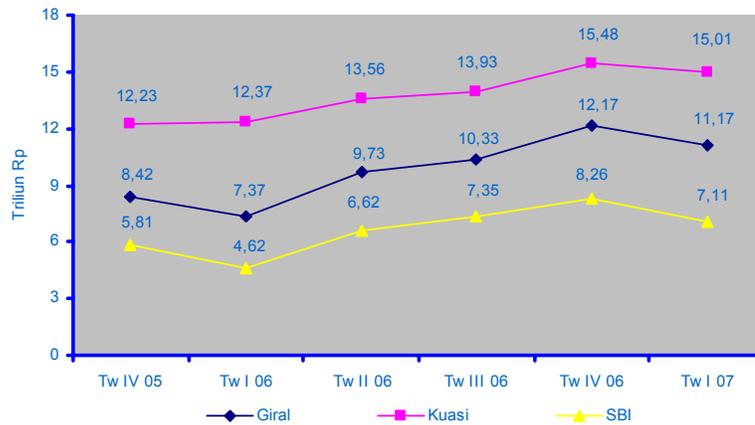
Hingga periode laporan PVA yang melakukan kegiatan usaha diwilayah kerja KBI Pekanbaru tercatat 18 perusahaan, dengan nilai penjualan mencapai USD 3.196 ribu dan pembelian mencapai USD 3.196 ribu.

### 1. Perkembangan Moneter

Dalam triwulan laporan terjadi penurunan uang kuasi (tabungan dan deposito), uang giral dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penurunan jumlah uang kuasi dan uang giral pada triwulan laporan cukup wajar mengingat pada awal tahun aktivitas perekonomian biasanya melambat. Sementara itu penurunan jumlah SBI antara lain terkait dengan berkurangnya dana milik Pemda.

Pada triwulan, laporan jumlah uang kuasi mengalami penurunan dari Rp.15.013.947 juta menjadi Rp.15.487.682 juta atau tumbuh sebesar 3,06%, dan uang giral menurun dari Rp.11.165.540 juta menjadi Rp.12.165.797 juta, atau turun sebesar Rp.8,22% dibanding triwulan IV - 2006. Dengan demikian, secara total dana pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito) yang merupakan bagian dari komponen uang beredar mengalami penurunan sebesar Rp.1.473.992 juta (5,33%) menjadi sebesar Rp.26.179.487 juta. Penempatan dana dalam bentuk SBI menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari Rp.8.225.720 juta pada triwulan IV-2006 menjadi Rp.7.108.831 juta, atau turun 13,99%.

Grafik 3.1. Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Propinsi Riau



## 2. Perkembangan Perbankan

Kondisi perbankan di propinsi Riau pada trilwulan laporan menunjukkan perkembangan yang sedikit menurun. Total aset perbankan mengalami penurunan sejalan dengan penurunan dana pihak ketiga. Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami perlambatan jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, dari sisi pengelolaan risiko terjadi sedikit peningkatan risiko kredit yang ditunjukkan dengan peningkatan rasio *non performing loans* (NPLs). Di sisi pendanaan, terjadi penurunan pada dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan sehingga terjadi penurunan alat likuid yang dimiliki oleh perbankan. Lebih besarnya penurunan alat likuid dibandingkan penurunan *Non Core Deposit* (NCD) menyebabkan menurunnya rasio alat likuid terhadap *Non Core Deposit* (NCD). Namun demikian, penurunan tersebut masih dalam tahap yang wajar. Dalam kondisi perekonomian yang semakin membaik, perbankan propinsi Riau berhasil membukukan laba yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal lain yang menggembarakan adalah meningkatnya LDR dan penyaluran kredit kepada UMKM dalam triwulan laporan, sehingga pangsa kredit UMKM terhadap total kredit terus mengalami peningkatan.

## 2.1. Bank Umum

### 2.1.1. Jumlah Bank dan Jaringan Kantor

Tabel 3.1. Perkembangan Lembaga Bank di Propinsi Riau

Keterangan	Periode	
	Tw IV 06	Tw I 07
1. Jumlah Bank	28	29
- Pemerintah	6	6
- Swasta	20	20
- Asing	0	1
- Syariah	2	2
2. Kantor Pusat	1	1
3. Kantor Cabang	64	64
- Pemerintah	39	41
- Swasta	25	22
- Asing	0	1
4. Kantor Cab. Pembantu	86	83
- Pemerintah	45	46
- Swasta	41	37
- Asing	0	0
5. Kantor Kas	34	34
- Pemerintah	21	22
- Swasta	13	12
6. BRI Unit	72	71
7. DSP	12	12
8. Lainnya *)	15	36
	<b>284</b>	<b>301</b>

\*) Payment point, VOA, RCR Kantor Layanan Syariah dan Gerai

Jumlah bank umum yang beroperasi di propinsi Riau hingga akhir triwulan laporan tercatat 29 bank, baertambah 1 bank yaitu bank Commonwealth. Selama triwulan laporan terdapat pembukaan 1 Kantor Cabang di Pekanbaru dan terdapat penambahan kantor dibawah kantor kas hampir di setiap kabupaten dengan total penambahan 21 kantor. Namun demikian, terdapat penutupan 3 Kantor Cabang Pembantu yang terjadi di kota Pekanbaru, sehingga secara total jumlah jaringan kantor bank bertambah 17 kantor dari 284 kantor menjadi 301 kantor, yang terdiri dari 64 Kantor Cabang, 83 Kantor Cabang Pembantu, 71 BRI unit, 12 DSP dan 36 lainnya.

Diperkirakan perluasan jaringan kantor bank umum di propinsi Riau masih akan berlanjut, termasuk kemungkinan masuknya bank-bank asing atau campuran. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin matang, dan perkembangan ekonomi di kota/kabupaten yang cukup pesat merupakan insentif bagi bank-bank untuk membuka jaringan kantornya. Penyebaran kantor di propinsi Riau dapat dilihat pada tabel 3.2. Data tersebut menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten jumlah bank yang beroperasi masih relatif terbatas, terutama bank-bank swasta.

Tabel 3.2. Peta Perbankan Propinsi Riau (Maret 2007)

No	Kab./Kota	Jumlah Kantor Bank Umum di Kabupaten/Kota						
		KP	KC	KCP	KK	BRI Unit	DSP	Lainnya
1	Pekanbaru	1	36	43	17	15	4	18
2	Bengkalis	0	7	10	2	11	1	6
3	Dumai	0	6	2	2	5	1	4
4	Indragiri Hulu	0	4	3	5	4	1	0
5	Indragiri Hilir	0	3	2	0	8	0	1
6	Kampar	0	2	3	1	8	1	2
7	Kuantan Singingi	0	1	2	2	6	1	2
8	Pelalawan	0	1	6	0	4	1	1
9	Rokan Hulu	0	1	3	1	2	1	0
10	Rokan Hilir	0	2	4	2	4	1	0
11	Sak	0	1	5	2	4	0	2
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>64</b>	<b>83</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>36</b>

Tabel 3.3. Data ATM Bank Per Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau

No.	Keterangan	Des-06	Mar-07
<b>I.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>		
1	Pekanbaru	201	207
2	Dumai	16	14
3	Bengkalis	26	29
4	Inhil	6	6
5	Inhu	5	4
6	Rohil	6	7
7	Rohul	3	3
8	Kampar	3	3
9	Sak	16	16
10	Palalawan	11	12
11	Kuantan Singingi	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>296</b>	<b>304</b>
<b>II.</b>	<b>Kelompok Bank</b>		
1	Pemerintah	155	167
2	Swasta	141	137
	<b>Jumlah</b>	<b>296</b>	<b>304</b>

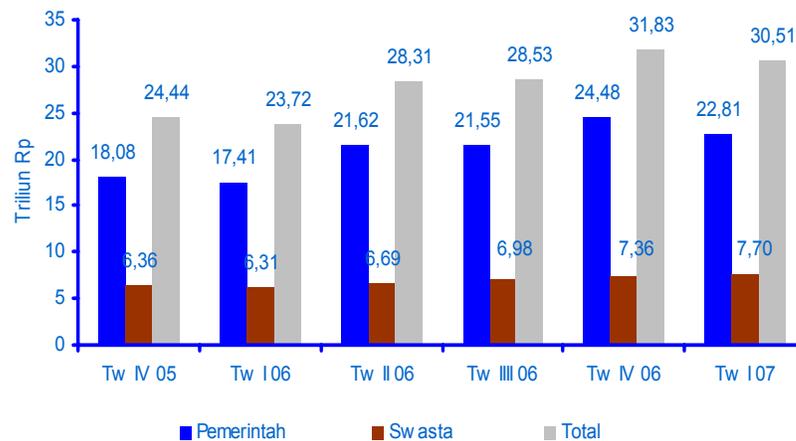
Seiring dengan penambahan jumlah kantor bank, jumlah ATM yang beroperasi di propinsi Riau juga mengalami peningkatan. Selama triwulan laporan, terdapat penambahan 3 unit ATM di Bengkalis dan masing-masing 1 unit di Rokan Hilir dan Pelalawan, namun demikian terdapat penutupan 3 unit ATM. Sehingga secara total jumlah jaringan ATM bertambah 8 unit dari 296 unit menjadi 304 unit.

### 2.1.2. Perkembangan Aktiva

Total Aset bank umum di propinsi Riau selama triwulan laporan mengalami penurunan sebesar Rp.1.37.103 juta atau 4,17% menjadi Rp.30.507.664 juta. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok bank pemerintah, sementara aset pada kelompok bank swasta mengalami peningkatan. Total aset bank pemerintah turun sebesar 6,84% dari Rp.24.485.409 juta menjadi Rp.22.809.511 juta, sementara total aset kelompok bank swasta

tumbuh 4,75% dari Rp.7.349.358 juta menjadi Rp.7.698.153 juta. Penurunan total aset tersebut disebabkan karena adanya penarikan Dana Pihak Ketiga pada kelompok bank pemerintah utamanya terkait dengan realisasi pembayaran beberapa proyek pemerintah, sehingga bank harus mencairkan penanamannya pada SBI. Sementara itu, peningkatan DPK yang terjadi pada kelompok bank swasta mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kelompok bank swasta.

Grafik 3.2. Perkembangan Aktiva Perbankan  
di Propinsi Riau



### 2.1.3. Risiko Kredit

Risiko kredit menunjukkan sedikit peningkatan setelah menurun cukup signifikan pada triwulan sebelumnya. Peningkatan risiko tersebut seiring dengan peningkatan penyaluran kredit. Sektor riil juga sudah mulai melakukan penarikan kredit yang telah disetujui pada triwulan-triwulan sebelumnya, yang ditunjukkan dengan menurunnya *Undisbursed Loan*. Perbankan juga melakukan diversifikasi risiko kreditnya melalui penyaluran kredit kepada sektor UMKM, yang jumlahnya terus menunjukkan peningkatan.

### 2.1.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menciptakan iklim makro ekonomi yang kondusif tampak mulai menunjukkan hasil. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut antara lain adalah upaya mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi pada tahun 2007 yaitu dengan melakukan penyempurnaan ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007.

Posisi kredit yang disalurkan oleh perbankan di propinsi Riau pada akhir triwulan laporan tumbuh sebesar 1,07% dari Rp.13.854.841 juta menjadi Rp.14.002.435 juta. Namun, pertumbuhan kredit tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,15%. Peningkatan kredit terjadi baik pada kelompok bank pemerintah maupun kelompok bank swasta. Kredit pada kelompok bank pemerintah tumbuh 0,03% menjadi Rp.9.628.109 juta, sementara pada kelompok bank swasta tumbuh 3,43% menjadi Rp.4.374.326 juta.

Tabel 3.4. Posisi Kredit Di Propinsi Riau  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tw IV 05	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Δ
<b>A. Kelompok Bank</b>							
1. Bank Pemerintah	8.342.732	8.538.114	8.992.459	9.089.684	9.625.537	9.628.109	0,03%
2. Bank Swasta	3.848.349	3.962.672	4.113.082	4.213.354	4.229.304	4.374.326	3,43%
<b>B. Jenis Penggunaan</b>							
1. Modal Kerja	4.421.644	4.649.486	4.541.109	4.497.601	4.921.399	4.965.493	0,90%
2. Investasi	4.471.418	4.404.999	4.824.022	4.897.612	4.807.768	4.768.110	-0,82%
3. Konsumsi	3.298.019	3.446.301	3.740.410	3.907.825	4.125.674	4.268.832	3,47%
<b>C. Valuta</b>							
1. Rupiah	10.458.571	10.958.822	11.561.924	11.870.866	12.327.023	12.477.855	1,22%
2. Valas	1.732.510	1.541.964	1.543.617	1.432.172	1.527.818	1.524.580	-0,21%
<b>D. Total</b>	<b>12.191.081</b>	<b>12.500.786</b>	<b>13.105.541</b>	<b>13.303.038</b>	<b>13.854.841</b>	<b>14.002.435</b>	<b>1,07%</b>

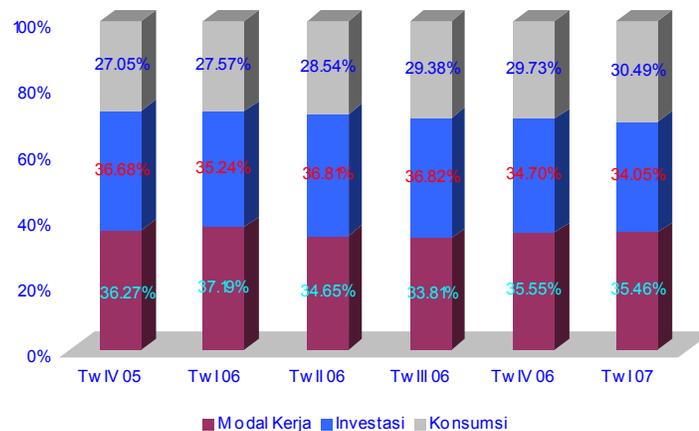
Dilihat dari jenis valutanya, kredit dalam mata uang rupiah tumbuh sebesar 1,22% menjadi sebesar Rp.12.477.855 juta, sementara kredit dalam valuta asing turun sebesar 0,21% menjadi Rp.1.524.580 juta. Menurunnya posisi kredit dalam valuta asing tersebut terjadi karena adanya penguatan rupiah

terhadap mata uang asing selama triwulan I - 2007. Pangsa kredit rupiah terhadap total kredit relatif tetap yaitu sekitar 89,11%.

### 2.1.3.2. Konsentrasi Kredit

Berdasarkan jenis penggunaan, pangsa kredit modal kerja dan kredit investasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha masih relatif tinggi, walaupun dengan trend yang menurun. Pada triwulan laporan pangsa kedua jenis kredit tersebut tercatat sebesar 69,51% dari total kredit, sementara pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 70,22%. Jumlah kredit modal kerja tercatat sebesar Rp.4.965.493 juta atau tumbuh sebesar 0,90%, sedangkan kredit investasi tercatat sebesar Rp.4.768.110 juta, atau turun sebesar 0,82%. Penurunan kredit investasi terutama terjadi pada sub sektor tanaman perkebunan dan komunikasi. Di sisi lain, kredit konsumsi terus menunjukkan pertumbuhan, dan untuk triwulan laporan tumbuh 3,47% menjadi Rp.4.268.832 juta. Sekitar 30,3% dari kredit konsumsi tersebut adalah kredit untuk perumahan, terutama perumahan type 70 ke bawah, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 40% dari total kredit konsumsi. Sekitar 26% dari kredit modal kerja terkonsentrasi pada perdagangan eceran.

Grafik 3.3. Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan Di Propinsi Riau



Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit masih terkonsentrasi pada sektor pertanian yang mencapai 24,76% dari total kredit, dengan jumlah nominal mencapai Rp.3.466.878 juta atau turun 1,14% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut sebesar Rp.3.125.709 juta (90,16%) merupakan kredit kepada sektor perkebunan. Tingginya pangsa kredit yang disalurkan pada sektor pertanian terutama dipengaruhi oleh besarnya skala usaha di sub sektor perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa sehingga mampu menyerap kredit dalam jumlah yang besar. Bila dilihat dari jenis penggunaannya, sebesar Rp.2.292.024 juta atau 73,33% dari total kredit kepada sub sektor perkebunan adalah kredit investasi, sementara sisanya berupa kredit modal kerja.

Sektor usaha yang juga menyerap kredit cukup besar adalah sektor perdagangan (perdagangan, restoran dan hotel), yaitu mencapai Rp.2.771.654 juta atau 19,79% dari total kredit. Penyerapan kredit yang tinggi pada sektor perdagangan tidak terlepas dari pengaruh peningkatan aktivitas ekonomi di Riau yang antara lain tercermin pada peningkatan pangsa sektor perdagangan dalam PDRB Riau.

Sementara itu kredit kepada sektor industri tercatat sebesar Rp.1.740.767 juta atau 12,42%, dan kredit kepada sektor lain-lain tercatat sebesar Rp.4.281.890 juta atau 30,58% dari total kredit. Dalam kredit sektor lain-lain tersebut termasuk kredit perumahan yang tercatat Rp.1.733.271 juta atau 12,38% dari total kredit. Kredit sektor konstruksi tercatat sebesar Rp.504.644 juta, sedikit menurun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.519.098 juta. Jumlah tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan perkembangan sektor properti di propinsi Riau, sehingga ditengarai banyak developer yang menggunakan *self financing* untuk membiayai proyeknya. Dengan melihat perkembangan yang menggembirakan untuk kredit pada sektor pertanian dan perdagangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penyaluran kredit oleh perbankan sudah sejalan dengan kebijakan ekonomi daerah yang terlihat dari besarnya peranan sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB.

Dilihat dari penyebaran kredit di kota/kabupaten, kredit yang disalurkan oleh perbankan yang berlokasi di Propinsi Riau masih terkonsentrasi di kota Pekanbaru. Posisi kredit yang disalurkan oleh perbankan di kota ini sampai akhir periode laporan tercatat sebesar Rp.10.519.123 juta (75,12%). Kondisi tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat kota Pekanbaru adalah ibukota Propinsi Riau, sehingga disamping berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kota ini juga menjadi pusat bisnis utama baik perbankan maupun non perbankan di Propinsi Riau yang tumbuh cukup pesat di era Otonomi Daerah. Besarnya potensi ekonomi di kabupaten dan kota di propinsi Riau juga terlihat dari lebih besarnya penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek. Jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar Rp.20.096.766 juta. Posisi kredit berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan posisi kredit berdasarkan lokasi bank pada semua kota/kabupaten. Kredit berdasarkan lokasi proyek pada triwulan laporan mengalami penurunan pada semua kota dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tertinggi terdapat di kota Dumai dan Indragiri Hilir, yang masing-masing turun 16,09% dan 5,29%.

Tabel 3.5. Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II Di Propinsi Riau (Jutaan Rupiah)

No	Kab./Kota	Lokasi Bank			Lokasi Proyek di Riau		
		Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07
1	Pekanbaru	10.066.385	10.418.990	10.519.123	9.183.543	10.976.924	11.003.165
2	Bengkalis	272.749	378.192	393.854	1.162.558	1.190.135	1.067.299
3	Dumai	505.666	528.615	551.231	1.330.639	1.621.055	897.156
4	Indragiri Hilir	781.639	788.122	734.344	1.213.939	1.223.378	1.196.817
5	Indragiri Hulu	531.983	572.889	561.651	1.741.299	1.807.521	1.717.276
6	Lainnya	1.144.616	1.168.033	1.242.232	4.497.805	5.079.588	4.215.053
<b>Jumlah</b>		<b>13.303.038</b>	<b>13.854.841</b>	<b>14.002.435</b>	<b>19.129.783</b>	<b>21.898.601</b>	<b>20.096.766</b>

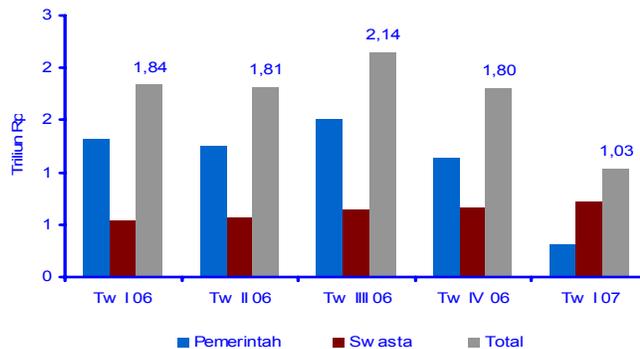
### 2.1.3.3. Undisbursed Loan dan Persetujuan Kredit Baru

Jumlah *undisbursed loan* (kredit yang belum ditarik) pada triwulan laporan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari Rp.1.795.431 juta menjadi Rp.1.032.895 juta. Dari jumlah tersebut, sebesar 69,85% tercatat pada kelompok bank swasta. Penurunan jumlah *undisbursed loan* mengindikasikan sektor riil

yang sudah mulai bergerak seiring dengan perbaikan indikator-indikator makro ekonomi dalam triwulan laporan.

Bila dilihat berdasarkan sektor ekonomi, 46,75% dari kredit yang belum ditarik tersebut merupakan kredit kepada sektor perdagangan. Beberapa sektor lain yang mempunyai kelonggaran tarik yang cukup besar adalah sektor jasa dunia usaha, pertanian dan konstruksi. Jumlah kelonggaran kredit yang cukup besar tersebut terutama disebabkan adanya jadwal/termin dari penarikan kredit dan sebagian besar kredit tersebut adalah kredit investasi.

Grafik 3.4. Jumlah Undisbursed Loan Perbankan Propinsi Riau



Kondisi ekonomi makro yang semakin kondusif dalam triwulan laporan mendorong peningkatan jumlah persetujuan kredit selama triwulan laporan, dari Rp.1.738.814 juta menjadi Rp.1.835.259 juta atau meningkat 5,55% dibanding triwulan sebelumnya.

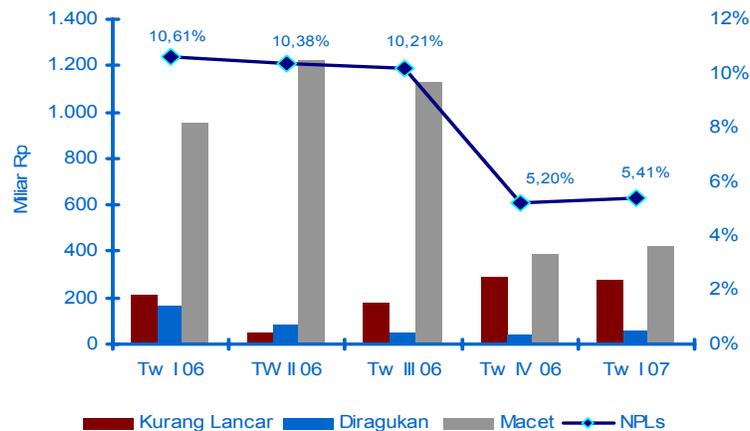
Tabel 3.6. Persetujuan Kredit Baru Di Propinsi Riau

Jenis Kredit	Tw I 06		Tw II 06		Tw III 06		Tw IV 06		Tw I 07	
	Rp. Juta	%								
1. Modal Kerja	380.211	32,04	443.053	32,66	495.053	31,51	819.377	47,12	615.992	33,56
2. Investasi	271.238	22,86	240.130	17,70	457.743	29,13	356.390	20,50	422.917	23,04
3. Konsumsi	535.047	45,09	673.489	49,64	618.546	39,36	563.047	32,38	796.350	43,39
<b>Jumlah</b>	<b>1.186.496</b>	<b>100</b>	<b>1.356.672</b>	<b>100</b>	<b>1.571.342</b>	<b>100</b>	<b>1.738.814</b>	<b>100</b>	<b>1.835.259</b>	<b>100</b>

#### 2.1.3.4. Kualitas Kredit

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibanding triwulan sebelumnya yang tercermin dari naiknya rasio *Non Performing Loans* (NPLs) terhadap kredit dari 5,20% menjadi 5,41% pada triwulan laporan. Namun turun cukup signifikan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,61%. Peningkatan NPLs pada triwulan laporan terjadi karena meningkatnya nominal kredit kategori non lancar pada bank milik pemerintah maupun swasta. Trend penurunan NPLs sejak Triwulan III - 2006 sampai Triwulan I - 2007 adalah hasil dari restrukturisasi yang sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2006, yang penurunannya baru terlihat setelah 3 bulan, karena kredit yang direstrukturisasi tidak langsung dapat digolongkan sebagai *performing loan*, tapi harus menunggu selama tiga bulan untuk dilihat kelancaran pembayarannya. Bila pembentukan pencadangan aktiva produktif diperhitungkan dalam rasio NPLs, maka rasio *NPLs net*<sup>1</sup> perbankan pada triwulan laporan sebesar 2,51%, turun dari rasio periode sebelumnya sebesar 2,67%. Rasio NPLs gross perbankan nasional pada periode yang sama tercatat 6,6% sementara NPLs net tercatat 3,1%, lebih tinggi dari NPLs gross dan NPLs net Provinsi Riau.

Grafik 3.5. Perkembangan NPLs Gross Di Propinsi Riau



<sup>1</sup> Jumlah kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet - dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif untuk kredit KL, D, M - dibagi total kredit.

Sektor konstruksi yang sebelumnya mempunyai NPLs tertinggi naik dari 18,90% menjadi 19,32% pada triwulan laporan. Namun demikian NPLs tertinggi pada triwulan laporan terdapat pada sektor listrik, gas dan air yaitu 22,30%. NPLs pada sektor ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding sebelumnya yang tercatat 0,00%, namun mengingat pangsa kredit pada sektor ini relatif kecil, tingginya prosentase NPLs pada sektor ini tidak terlalu mempengaruhi risiko kredit secara keseluruhan.

Tabel 3.7. NPLs Per Sektor Ekonomi Di Propinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Δ (%)	
							Tw III 06	Tw IV 06
1	Pertanian	3,80%	3,66%	2,44%	5,61%	5,73%	3,17%	0,12%
2	Pertambangan	0,00%	0,00%	0,00%	11,38%	10,19%	11,38%	-1,19%
3	Perindustrian	44,90%	46,27%	48,76%	7,55%	8,34%	-41,21%	0,79%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,30%	0,00%	22,30%
5	Konstruksi	13,35%	12,18%	16,73%	18,90%	19,32%	2,17%	0,43%
6	Perdag., Resto. & Hotel	9,07%	8,55%	6,63%	5,56%	5,98%	-1,07%	0,42%
7	Pengangkutan, Pergud.	4,61%	1,16%	2,27%	1,62%	2,18%	-0,65%	0,56%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	3,39%	3,66%	3,46%	3,37%	3,88%	-0,09%	0,51%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	10,07%	11,59%	10,39%	11,93%	11,90%	1,54%	-0,03%
10	Lain-lain	1,85%	2,10%	2,24%	2,25%	2,24%	0,01%	-0,01%

Berdasarkan penyebarannya, rasio NPLs tertinggi terdapat pada kota Indragiri Hilir, dan diikuti dengan Dumai dan Pekanbaru. Perbaikan NPLs terjadi pada NPLs di kota Dumai, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

Tabel 3.8. NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten Di Propinsi Riau

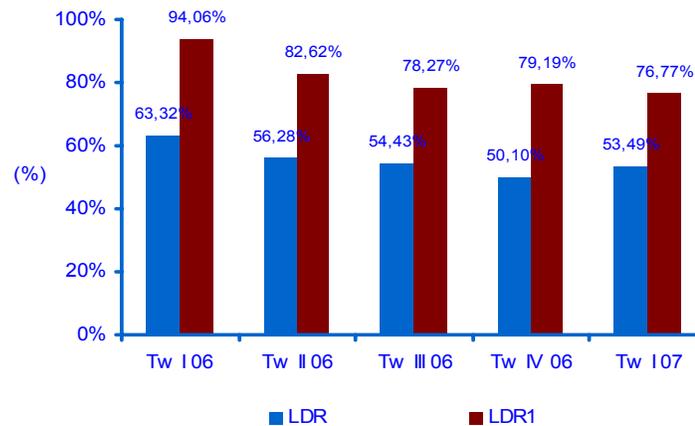
No.	Kab./Kota	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Δ (%)	
							Tw III 06	Tw IV 06
1	Pekanbaru	13,18%	12,99%	12,89%	4,07%	4,52%	-8,82%	0,46%
2	Dumai	1,03%	0,77%	1,53%	5,87%	5,79%	4,34%	-0,07%
3	Bengkalis	4,77%	5,48%	5,62%	0,80%	1,36%	-4,82%	0,55%
4	Indragiri Hulu	0,68%	0,66%	0,85%	2,22%	2,17%	1,37%	-0,05%
5	Indragiri Hilir	2,65%	2,49%	2,61%	30,66%	29,98%	28,05%	-0,68%
6	Lainnya	0,72%	1,08%	0,70%	0,61%	1,03%	-0,09%	0,42%

### 2.1.3.4. Intermediasi Perbankan

#### a. Perkembangan LDR

Pada triwulan laporan terjadi penurunan dana pihak ketiga (DPK), baik dana milik pemerintah daerah maupun dana milik perorangan, namun penyaluran kredit mengalami peningkatan bila dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau mengalami peningkatan. Pada akhir periode laporan, LDR tercatat 53,49% naik dibandingkan posisi LDR pada triwulan sebelumnya yang tercatat 50,10%. Sebagai perbandingan LDR perbankan nasional pada triwulan yang sama tercatat 65,3%. Namun demikian, jika jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di luar Propinsi Riau untuk membiayai proyek di Riau turut diperhitungkan maka LDR meningkat dari 79,19% menjadi 82,20% pada triwulan laporan.

Grafik 3.6. Perkembangan LDR Di Propinsi Riau



Ket : LDR1 = rasio kredit berdasarkan lokasi proyek terhadap DPK

#### b. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Penyaluran kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan laporan kredit kepada UMKM tercatat telah mencapai Rp.9.038.568 juta atau tumbuh sebesar 3,49%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya dan pertumbuhan kredit secara keseluruhan pada triwulan laporan.

Dengan demikian pangsa kredit UMKM semakin mendominasi dalam total kredit perbankan propinsi Riau, yaitu mencapai 64,55% pada triwulan laporan. Upaya perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM merupakan indikasi adanya potensi dan kepedulian perbankan dalam pengembangan UMKM disamping untuk meminimalisasi risiko kredit mengingat kualitas kredit UMKM lebih baik dibandingkan dengan kualitas kredit kepada korporasi.

Tabel 3.9. Perkembangan Kredit UMKM di Propinsi Riau

Plafon	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07
	(Rp. Juta)				
Kredit Mikro (Rp.0 - 50 jt)	2.864.537	3.152.811	3.218.001	3.370.785	3.417.303
Kredit Kecil (Rp.50 jt - Rp. 500 jt)	2.315.798	2.536.701	2.828.557	2.999.749	3.177.459
Kredit Menengah (Rp.500 jt - Rp.5 m)	2.098.756	2.220.703	2.260.357	2.362.892	2.443.806
Kredit Corporate (> Rp.5 m)	5.221.695	5.195.326	4.996.123	5.121.415	4.963.867
Total Kredit	12.500.786	13.105.541	13.303.038	13.854.841	14.002.435
Total Kredit UMKM	7.279.091	7.910.215	8.306.915	8.733.426	9.038.568
(% terhadap Total Kredit)	58,23%	60,36%	62,44%	63,04%	64,55%

Menurut jenis penggunaan, sebesar 52,86% dari total pembiayaan kepada UMKM tersebut digunakan untuk sektor produktif (kredit modal kerja dan investasi) dan sisanya untuk pembiayaan konsumsi.

Kualitas kredit UMKM mengalami penurunan yang tercermin dari kenaikan rasio NPLs terhadap total kredit dari 2,92% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,28% pada triwulan laporan. Penurunan kualitas kredit terjadi hampir di semua sektor usaha, kecuali kredit di sektor pertambangan dan jasa-jasa sosial. NPLs sektor perindustrian meningkat dari 5,86% menjadi 8,55% dan NPLs sektor listrik, gas dan air dari 0% menjadi 22,30%.

Tabel 3.10. Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi di Propinsi Riau

No	Sektor Ekonomi	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Δ (%)	
							Tw IV 06	Tw I 07
1	Pertanian	3,75%	3,08%	3,35%	2,80%	4,01%	-0,55%	1,21%
2	Pertambangan	0,00%	0,00%	0,00%	11,38%	10,19%	11,38%	-1,19%
3	Perindustrian	11,91%	12,94%	14,54%	5,86%	8,55%	-8,67%	2,69%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,30%	0,00%	22,30%
5	Konstruksi	13,63%	12,39%	9,36%	8,92%	9,22%	-0,45%	0,30%
6	Perdag., Resto. & Hotel	3,29%	3,39%	3,36%	3,22%	3,67%	-0,15%	0,45%
7	Pengangkutan, Pergud.	6,49%	1,76%	3,34%	2,41%	2,92%	-0,93%	0,50%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	3,27%	2,36%	2,25%	1,73%	2,41%	-0,52%	0,68%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	17,67%	16,61%	13,24%	16,63%	16,30%	3,40%	-0,33%
10	Lain-lain	1,85%	2,08%	2,23%	2,31%	2,30%	0,08%	-0,01%

Bila dilihat dari penyebarannya, maka dalam triwulan laporan NPLs UMKM tertinggi tercatat di kota Dumai, yaitu mencapai 6,37%, sedangkan NPLs terendah tercatat di kabupaten Indragiri Hulu yang tercatat 1,04%. Penurunan kualitas kredit UMKM terjadi hampir di semua kota/kabupaten, kecuali di kota Dumai.

Tabel 3.11. Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Propinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Δ (%)	
							Tw IV 06	Tw I 07
1	Pekanbaru	4,01%	3,79%	3,85%	3,13%	3,91%	-0,72%	0,78%
3	Bengkalis	5,21%	5,97%	1,53%	0,80%	1,36%	-0,72%	0,55%
2	Dumai	1,04%	0,77%	6,13%	6,46%	6,37%	0,33%	-0,09%
5	Indragiri Hilir	1,29%	1,25%	2,12%	0,85%	1,35%	-1,27%	0,49%
4	Indragiri Hulu	1,86%	1,72%	1,42%	0,47%	1,04%	-0,95%	0,56%
6	Lainnya	0,73%	1,08%	0,70%	2,11%	1,03%	1,41%	-1,08%

#### 2.1.4. Risiko Likuiditas

Kondisi likuiditas perbankan menunjukkan penurunan jika dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tetap berada pada batas aman. Komponen giro dan tabungan mengalami penurunan, sedangkan deposito meningkat, walaupun sukunbunga deposito sudah menunjukkan penurunan seiring dengan penurunan BI Rate. Sementara itu rasio alat likuid terhadap *Non Core Deposit* juga mengalami penurunan karena penurunan penanaman dalam bentuk SBI.

#### 2.1.4.1. Perkembangan dan Struktur Dana Pihak Ketiga

Posisi Dana Pihak Ketiga dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp.26.179.487 juta, turun sebesar Rp.1.473.992 juta (5,33%) dari DPK triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.27.653.479 juta. Terjadi penurunan yang sangat tajam bila dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada triwulan selanjutnya yang tumbuh 13,15%, namun demikian penurunan DPK pada triwulan laporan nampaknya lebih disebabkan oleh faktor musiman, mengingat pada triwulan I - 2005 terjadi penurunan DPK sebesar 2,98% dan triwulan I - 2006 terjadi penurunan DPK sebesar 4,39%.

Penurunan DPK terjadi pada giro dan tabungan, sedangkan deposito secara total mengalami peningkatan, namun demikian terjadi penurunan pada deposito berjangka waktu panjang. Komponen giro turun sebesar Rp.1.000.257 juta (8,22%) menjadi Rp.11.165.540 juta, dan tabungan turun sebesar Rp.537.776 juta (5,87%) menjadi Rp.8.625.258 juta. Sementara itu, deposito secara total meningkat Rp.64.041 juta (1,01%) menjadi Rp.6.388.689 juta. Dengan perkembangan tersebut maka pangsa DPK jangka pendek terhadap total DPK mencapai 97,73%

Tabel 3.12. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Propinsi Riau (Miliar Rp)

	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07
<b>Jangka Pendek</b>					
- Giro	7.373	9.729	10.330	12.166	11.166
- Tabungan	6.661	6.966	7.299	9.157	8.625
- Deposito (s.d 3 bln)	5.244	6.070	6.114	5.700	5.796
<b>Total</b>	<b>19.278</b>	<b>22.766</b>	<b>23.742</b>	<b>27.023</b>	<b>25.586</b>
<b>Jangka Menengah dan Panjang</b>					
- Deposito 3-6 bln	166	193	209	223	272
- Deposito 6-12 bln	233	240	233	234	218
- Deposito > 12 bln	66	86	75	167	103
<b>Total</b>	<b>465</b>	<b>519</b>	<b>517</b>	<b>625</b>	<b>593</b>
<b>Total DPK</b>	<b>19.742</b>	<b>23.285</b>	<b>24.259</b>	<b>27.648</b>	<b>26.179</b>

Penurunan DPK terjadi pada kelompok pemerintah yang pada triwulan laporan tercatat Rp.19.576.143 juta atau turun sebesar Rp.1.716.797 juta (8,06%) yang terjadi pada komponen giro dan tabungan. Sementara DPK pada kelompok bank swasta meningkat sebesar Rp.242.805 juta (3,82%) yang terjadi karena peningkatan komponen giro, tabungan dan deposito. Dengan penurunan DPK yang cukup besar pada kelompok bank pemerintah,

maka pangsa DPK kelompok tersebut terhadap total DPK perbankan Riau turun dari 77% menjadi 74,78%.

Tabel 3.13. Posisi Dana Perbankan Menurut Kelompok Bank & Jenis Simpanan di Propinsi Riau (Dalam Jutaan Rupiah)

Kelompok Bank & Jenis Simpanan	Triwulan IV 06			Triwulan I 07		
	Rupiah	Valas	Total	Rupiah	Valas	Total
1. Bank Umum Pemerintah						
a. Giro	10.419.052	418.531	10.837.583	9.293.778	384.228	9.678.006
b. Tabungan	6.622.925	0	6.622.925	6.052.835	0	6.052.835
c. Deposito	3.674.007	158.425	3.832.432	3.678.684	166.618	3.845.302
Sub Jumlah	20.715.984	576.956	21.292.940	19.025.297	550.846	19.576.143
2. Bank Swasta (Nas., Asing & Campuran)						
a. Giro	1.044.983	283.231	1.328.214	1.178.680	308.854	1.487.534
b. Tabungan	2.539.807	302	2.540.109	2.572.085	338	2.572.423
c. Deposito	2.369.577	122.639	2.492.216	2.430.000	113.387	2.543.387
Sub Jumlah	5.954.367	406.172	6.360.539	6.180.765	422.579	6.603.344
3. Seluruh Bank						
a. Giro	11.464.035	701.762	12.165.797	10.472.458	693.082	11.165.540
b. Tabungan	9.162.732	302	9.163.034	8.624.920	338	8.625.258
c. Deposito	6.043.584	281.064	6.324.648	6.108.684	280.005	6.388.689
<b>Jumlah</b>	<b>26.670.351</b>	<b>983.128</b>	<b>27.653.479</b>	<b>25.206.062</b>	<b>973.425</b>	<b>26.179.487</b>

Berdasarkan kepemilikannya, dalam triwulan laporan kepemilikan DPK masih tetap didominasi oleh nasabah perorangan (52,39%), diikuti dengan nasabah pemerintah daerah (33,30%), perusahaan swasta (7,70%) dan lainnya (1,33%). Penurunan DPK didominasi oleh penurunan DPK dari perusahaan swasta sebesar Rp.557.844 juta (-21,70%), dan DPK milik perorangan sebesar Rp.584.171 juta (-4,09%).

Tabel 3.14. Sebaran DPK menurut kepemilikan di Propinsi Riau (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kepemilikan	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Δ	
							Tw IV 06	Tw I 07
1	Pemerintah Pusat	115.383	123.459	77.170	332.244	146.652	330,54%	-55,86%
2	Pemerintah Daerah	5.345.044	8.208.857	7.988.156	8.810.308	8.717.756	10,29%	-1,05%
3	Badan/ Lembaga Pemerintah	162.001	159.024	305.303	283.123	262.742	-7,26%	-7,20%
4	Badan Usaha Milik Negara	235.158	230.842	173.289	298.184	188.739	72,07%	-36,70%
5	Badan Usaha Milik Daerah	10.862	10.496	23.398	31.091	14.738	32,88%	-52,60%
6	Perusahaan Asuransi	138.709	135.892	111.515	176.575	215.061	58,34%	21,80%
7	Perusahaan Swasta	1.802.791	2.145.815	1.814.267	2.571.259	2.013.415	41,72%	-21,70%
8	Yayasan dan Badan Sosial	101.234	105.334	106.550	168.372	221.694	58,02%	31,67%
9	Koperasi	95.811	116.851	134.047	239.056	319.939	78,34%	33,83%
10	Perorangan	11.479.324	11.700.691	13.166.617	14.298.921	13.714.750	8,60%	-4,09%
11	Lainnya	247.059	338.903	345.788	430.730	348.934	24,56%	-18,99%
12	Bukan Penduduk	8.888	9.019	13.078	13.616	15.067	4,11%	10,66%

Dilihat dari distribusinya, pangsa DPK terbesar masih ditempati oleh kota Pekanbaru sebesar 53,65%, diikuti oleh Bengkalis dan Dumai masing-masing sebesar 11,12% dan 6,33%. Penurunan DPK terjadi di semua kota/kabupaten. Penurunan terbesar terjadi di kabupaten Indragiri Hulu yang turun sebesar 15,20%, Namun penurunan Dana Pihak Ketiga di dominasi oleh kota Pekanbaru (4,64%).

Namun demikian, turunnya posisi Dana Pihak Ketiga yang diiringi dengan meningkatnya posisi kredit yang disalurkan merupakan indikasi meningkatnya kebutuhan pembiayaan investasi di sektor riil. Naiknya kebutuhan dana untuk investasi tersebut tercermin dari naiknya angka PDRB untuk investasi yang pada triwulan I tahun 2007 tercatat sebesar Rp.6.592.760 juta atau meningkat jika dibandingkan dengan triwulan IV - 2006 yang tercatat sebesar Rp.5.811.232 juta (atas dasar harga berlaku). Kondisi yang demikian pada akhirnya membawa dampak yang positif bagi dunia perbankan terutama apabila dilihat dari rasio LDRnya yang semakin membaik dan hal ini sekaligus merefleksikan semakin membaiknya fungsi intermediasi perbankan di Riau. Bank Indonesia juga melakukan penyamaan persepsi dengan perbankan sebagai tindak lanjut ketentuan relaksasi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia di tahun 2006 yang antara lain mencakup ketentuan KAP bank umum, ketentuan BMPK bank umum, ketentuan penyusunan kebijakan perkreditan bank dan ketentuan pembatasan pemberian kredit untuk pembiayaan pengadaan tanah. Inti dari berbagai ketentuan tersebut adalah perbankan diberi kebebasan yang lebih luas dalam menilai kredit dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Tabel 3.15. Penghimpunan DPK berdasarkan kota/kabupaten  
Di Propinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw I 06		Tw II 06		Tw III 06		Tw IV 06		Tw I 07	
		Rp. Juta	%								
1	Pekanbaru	11.624.627	58,88	12.699.119	54,54	13.198.185	54,40	14.730.699	53,27	14.046.210	53,65
3	Bengkalis	1.563.083	7,92	2.181.323	9,37	2.250.252	9,28	3.013.455	10,90	2.911.756	11,12
2	Dumai	1.360.841	6,89	1.485.656	6,38	1.494.088	6,16	1.741.626	6,30	1.656.496	6,33
5	Indragiri Hilir	729.310	3,69	919.221	3,95	1.005.082	4,14	882.450	3,19	872.256	3,33
4	Indragiri Hulu	749.360	3,80	870.757	3,74	883.115	3,64	1.258.673	4,55	1.067.302	4,08
6	Lainnya	3.715.043	18,82	5.129.107	22,03	5.428.456	22,38	6.026.576	21,79	5.625.467	21,49
	Jumlah	19.742.264	100,00	23.285.183	100,00	24.259.178	100,00	27.653.479	100,00	26.179.487	100,00

Dalam triwulan laporan, jumlah rekening DPK bertambah dari 1.377.121 rekening menjadi 1.416.689 rekening. Penambahan yang cukup signifikan terjadi pada rekening DPK dengan nominal saldo kurang dari Rp.1 juta, yang meningkat sekitar 54.907 rekening, sedangkan pada rekening DPK dengan saldo 50 juta - 100 juta rupiah terjadi pengurangan sekitar 8.984 rekening.

Tabel 3.16. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal Di Propinsi Riau

Klasifikasi	Tw I 06		Tw II 06		Tw III 06		Tw IV 06		Tw I 07	
	Jumlah	Jumlah								
	Rekening	DPK (Rp)								
< Rp.1 juta	1.219.098	602.697	943.009	534.297	836.334	486.133	924.735	535.087	979.642	568.694
Rp.1 juta s.d. <Rp.10 juta	182.515	418.701	192.589	449.302	292.597	880.727	211.177	552.782	203.330	560.285
Rp.10 juta s.d. <Rp.50 juta	180.297	4.024.036	173.849	3.920.958	160.701	3.559.186	180.830	4.085.182	185.332	4.295.640
Rp.50 juta s.d. <Rp.100 juta	13.912	928.620	13.067	911.367	12.679	859.975	29.786	2.135.710	20.802	1.597.840
Rp.100 juta s.d. <Rp.250 juta	17.050	2.987.587	17.228	2.852.672	19.322	3.204.668	21.599	3.483.208	19.659	3.256.087
Rp.250 juta s.d. <Rp.1.000 juta	5.400	2.304.794	5.529	2.432.406	6.144	2.605.402	6.719	2.975.907	5.992	2.751.411
Rp.1.000 juta s.d. <Rp.10.000 juta	1.437	3.981.597	1.723	5.505.517	1.738	4.696.283	2.111	5.049.046	1.782	4.424.235
>=Rp.10.000 juta	146	4.494.232	255	6.678.664	264	7.966.804	164	8.836.557	150	8.715.915
<b>Total</b>	<b>1.619.855</b>	<b>19.742.264</b>	<b>1.347.249</b>	<b>23.285.183</b>	<b>1.329.779</b>	<b>24.259.178</b>	<b>1.377.121</b>	<b>27.653.479</b>	<b>1.416.689</b>	<b>26.170.107</b>

#### 2.1.4.2. Rasio Alat Likuid

Jumlah alat likuid (kas dan Sertifikat Bank Indonesia) perbankan propinsi Riau turun 14,84% menjadi Rp.7.684.951 juta pada triwulan laporan. Penurunan tersebut terjadi baik pada komponen kas maupun SBI. Di sisi lain jumlah *Non Core Deposit* (NCD)<sup>2</sup> perbankan propinsi Riau juga turun sebesar 5,32% dari Rp.8.106.952 juta menjadi Rp.7.675.939 juta. Penurunan terjadi pada komponen giro dan tabungan yang masing-masing turun 8,22% dan 5,81%, sedangkan deposito berjangka waktu 1 - 3 bulan tumbuh sebesar 1,68%.

<sup>2</sup> Non Core Deposit merupakan dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 30% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Tabel 3.17. Perkembangan Alat Likuid dan Non Core Deposit

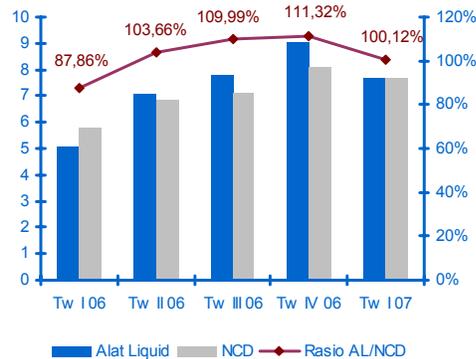
Alat Likuid	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07
Kas	463.078	460.588	487.409	768.834	576.120
SBI	4.617.879	6.618.828	7.346.871	8.255.746	7.108.831
<b>Alat Likuid</b>	<b>5.080.957</b>	<b>7.079.416</b>	<b>7.834.280</b>	<b>9.024.580</b>	<b>7.684.951</b>

Non Core Deposit (NCD)	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07
Giro (30%)	2.211.761	2.918.772	3.098.887	3.649.679	3.349.662
Tabungan (30%)	1.998.287	2.089.928	2.189.554	2.747.231	2.587.577
Dep 1-3 bln (30%)	1.573.264	1.821.071	1.834.165	1.710.041	1.738.700
<b>NCD</b>	<b>5.783.312</b>	<b>6.829.771</b>	<b>7.122.606</b>	<b>8.106.952</b>	<b>7.675.939</b>

Dengan perkembangan tersebut maka rasio Alat Likuid terhadap NCD mengalami penurunan dari 111,32% menjadi 100,32%, yang mengindikasikan turunnya kondisi likuiditas perbankan di propinsi Riau. Sepanjang tahun 2006, rasio ini terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan di awal triwulan 2007, terutama karena menurunnya penanaman dalam bentuk SBI. Walaupun terjadi penurunan, namun rasio tersebut masih cukup aman.

Grafik 3.7. Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit



### 2.1.5. Profitabilitas

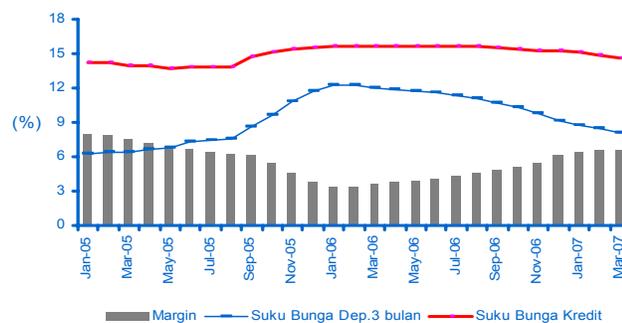
Kondisi profitabilitas perbankan propinsi Riau pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya

peningkatan penyaluran kredit dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sementara margin kredit yang dinikmati oleh perbankan semakin besar, sehingga cukup menguntungkan perbankan.

#### 2.1.5.1. Spread Bunga

Stabilitas ekonomi makro yang relatif terjaga yang ditandai dengan beberapa indikator seperti kecenderungan menguatnya nilai tukar dan inflasi yang terjaga, serta optimisme kalangan dunia usaha terhadap perbaikan kondisi perekonomian membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga BI rate-nya. Selama triwulan laporan BI rate telah mengalami penurunan sebanyak 75 *basis points* (bps), yaitu dari 9,75% pada Desember 2006, menjadi 9,50% pada Januari 2007, 9,25% pada Februari 2007 dan 9,00% pada Maret 2007. Kalangan perbankan merespon kebijakan ini dengan menurunkan suku bunga deposito (*weighted average*) sebesar 98 bps, dari 9,11% pada akhir Tw IV 2006 menjadi 8,13% pada Tw I 2007. Sedangkan suku bunga kredit (*weighted average*) hanya turun sebesar 55 bps dari 15,21% pada akhir Tw IV 2006 menjadi 14,66% pada Tw I 2007. Dengan demikian *spread* yang dinikmati perbankan pada triwulan laporan sebesar 6,53%, meningkat bila dibandingkan dengan *spread* pada triwulan sebelumnya yang mencapai 6,10% dan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,66%.

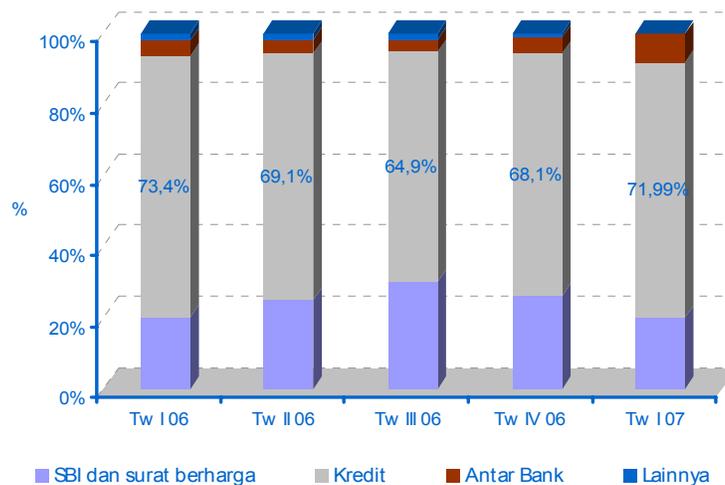
Grafik 3.8. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito



#### 2.1.5.2. Komposisi Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

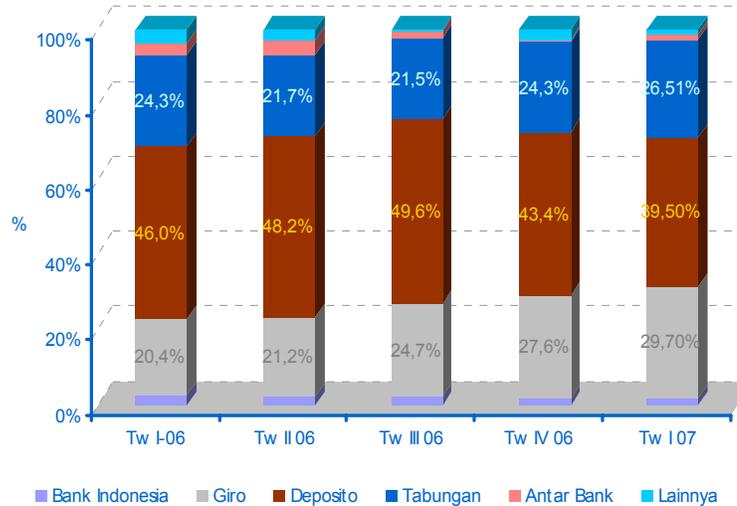
Selama triwulan laporan perbankan propinsi Riau mencatat pendapatan bunga sebesar Rp.680.764 juta, menurun bila dibandingkan dengan pendapatan bunga pada triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp.744.885 juta, namun lebih tinggi dari pendapatan bunga periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 616.092 juta. Hal ini dipicu oleh turunnya pendapatan bunga dari penempatan surat berharga (seperti SBI) yang turun 30,80% seiring dengan penurunan suku bunga SBI. Penurunan cukup besar juga terjadi pada pendapatan bunga lainnya, yang turun sebesar 75,03%, sementara pendapatan kredit turun sebesar 3,39%. Penurunan pendapatan bunga ini adalah akibat dari meningkatnya nominal kredit non lancar pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 3.9. Komposisi Pendapatan Bunga



Namun, beban bunga yang dikeluarkan perbankan juga mengalami penurunan sebesar 14,02% selama triwulan laporan, dari Rp. 393.369 juta menjadi Rp. 338.223 juta, yang dipicu oleh penurunan beban bunga untuk Dana Pihak Ketiga. Pembayaran bunga untuk Dana Pihak Ketiga mencapai 95,71% dari total pembayaran bunga yang dibayarkan oleh perbankan, sehingga jumlah Dana Pihak Ketiga cukup mempengaruhi beban bunga yang dikeluarkan perbankan.

Grafik 3.10. Komposisi Beban Bunga

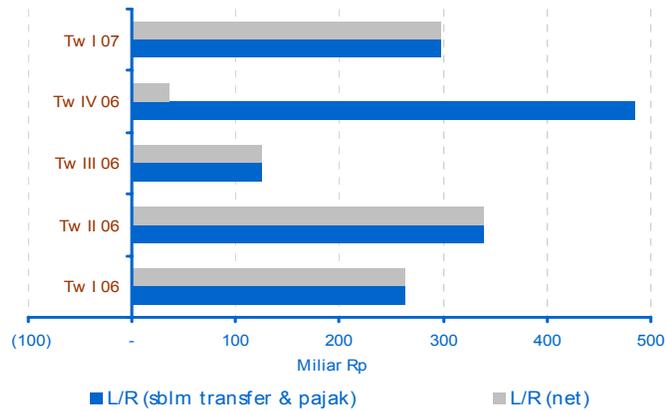


Seiring dengan penurunan pendapatan bunga yang diterima oleh bank karena peningkatan NPLs, maka *Net Interest Income* (NII) perbankan propinsi Riau pada triwulan laporan juga menurun dari Rp. 351,52 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi Rp. 342,54 miliar pada triwulan laporan.

#### 2.1.5.3. Perkembangan Laba Rugi

Selama triwulan laporan perbankan Riau mencatat perolehan laba sebesar Rp.298.108 juta, lebih tinggi bila dibandingkan dengan perolehan laba periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.262.536 juta atau meningkat 13,55%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan penyaluran kredit dan masih tingginya margin bunga yang dinikmati oleh perbankan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya dari 3,66% menjadi 6,53%.

Grafik 3.11. Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan)



## 2.2. Bank Perkreditan Rakyat

Secara umum kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 7,34% menjadi Rp.201,19 miliar, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian pada triwulan laporan. Peningkatan DPK tersebut juga diikuti dengan peningkatan kredit yang disalurkan. Pada triwulan laporan kredit tumbuh 9,32% dari Rp.168,74 miliar menjadi Rp.184,46 miliar. Namun kualitas kredit mengalami penurunan yang terlihat dari meningkatnya rasio NPLs terhadap total kredit dari 7,16% menjadi 7,93%, juga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan NPLs bank umum.

Tabel 3.18. Perkembangan Usaha BPR/BPRS  
Di Propinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Periode					Pert.
	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07	Tw IV 06
1. Jumlah BPRS	14	15	15	15	15	-
2. Asset	259,28	281,44	280,12	277,69	300,16	8,09%
3. DPK	135,23	208,78	184,38	187,43	201,19	7,34%
4. Kredit	135,46	150,50	166,55	168,74	184,46	9,32%
5. NPL (nominal)	4,46	12,47	15,13	12,09	14,62	20,93%
LDR (%)	100,17	72,08	90,33	90,02	91,68	1,84
NPLs (%)	3,29	8,28	9,08	7,16	7,93	10,62

Dilihat dari rasio-rasio kinerja, BPR/BPRS di Propinsi Riau mengalami perkembangan yang membaik. Namun permodalan BPR sedikit melemah yang terlihat dari menurunnya jumlah BPR dengan CAR >20% dari 14 BPR pada triwulan IV - 2006 menjadi 13 BPR pada triwulan laporan. CAR tertinggi tercatat 67,76%, lebih rendah dibandingkan dengan CAR tertinggi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 86,85%. Sementara itu CAR terendah tercatat 16,84%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 17,15%.

Tabel 3.19. Indikator Kinerja Utama BPR/BPRS Di Propinsi Riau

Keterangan	Jumlah BPR/BPRS				
	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07
1. CAR (%)					
a. 1 s.d. < 10	0	0	1	0	0
b. 10 s.d. < 20	4	6	8	1	2
c. >= 20	10	9	6	14	13
2. ROA (%)					
a. < 1	5	5	6	5	5
b. 1 - 5	3	7	6	8	6
c. > 5	6	3	3	2	4

Sementara itu *Return On Asset (ROA)* rasio menunjukkan perbaikan. Jumlah BPR dengan ROA >5% bertambah dari 2 BPR menjadi 4 BPR. ROA tertinggi pada triwulan laporan tercatat 19,92%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 20,19%, sedangkan ROA terendah tercatat -13,50%, lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -11,28%.

### 2.3. Bank Syariah

Kegiatan perbankan syariah pada triwulan laporan tetap menunjukkan perkembangan semakin membaik dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Dengan jumlah kelembagaan yang masih sama dengan triwulan sebelumnya, yaitu 5 bank yang terdiri dari 2 bank syariah dan 3 Unit Usaha Syariah (UUS), namun pada triwulan laporan penghimpunan dana dan pembiayaannya perbankan syariah di propinsi Riau mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan.

Tabel 3.20. Indikator Kinerja Utama Bank Syariah Di Propinsi Riau (Miliar Rp)

Keterangan	Periode					
	Tw IV 05	Tw I 06	Tw II 06	Tw III 06	Tw IV 06	Tw I 07
1. Jumlah	5	5	5	5	5	5
2. Asset	464,71	453,69	610,23	591,26	622,35	701,64
3. DPK	283,63	298,56	328,01	344,32	456,04	449,63
4. Pembiayaan	382,66	401,81	448,79	460,09	476,60	468,13
5. FDR	134,92%	134,58%	136,82%	133,62%	104,51%	104,11%

Total aset perbankan syariah pada triwulan laporan tumbuh 12,74% menjadi Rp.701,64 miliar, meskipun DPK menurun sebesar 1,41% dari Rp. 456,04 miliar menjadi Rp.449,63 miliar. Sementara itu pada posisi pembiayaan juga terjadi penurunan sebesar 1,78% dari Rp. 476,60 miliar menjadi Rp. 468,13 miliar.

Dilihat dari sektor yang dibiayai, 29,08% pembiayaan diberikan kepada sektor jasa dunia usaha, 20,79% untuk sektor lainnya (konsumsi) dan 13,83% untuk sektor pertanian. Kualitas pembiayaan pada akhir triwulan laporan menurun dibandingkan dengan kualitas pembiayaan pada triwulan sebelumnya, yang terlihat dari kenaikan rasio Non Performing Financing (NPFs) terhadap total pembiayaan dari 4,15% menjadi 5,19%. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada triwulan laporan tercatat sebesar 104,11%, lebih rendah bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 104,51%, lebih besar bila dibandingkan dengan rasio LDR pada bank konvensional maupun BPR.

### 3. Perkembangan Sistem Pembayaran

Perkembangan kegiatan pembayaran tunai dalam bentuk aliran uang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia pada triwulan I - 2007 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini sebagai konsekuensi logis mengingat pada triwulan sebelumnya terdapat perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru yang menimbulkan tingginya permintaan terhadap

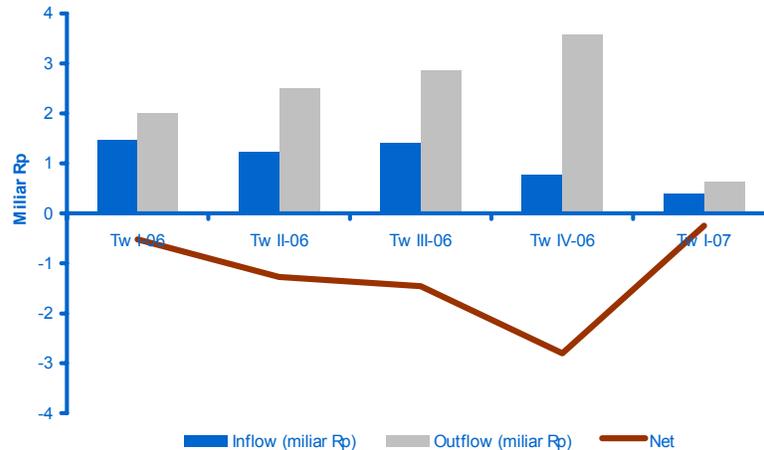
alat pembayaran. Dalam periode yang sama aliran uang masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia juga mengalami penurunan. Kondisi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kebijakan ujicoba kegiatan penyetoran dan pengambilan uang di Kantor Bank Indonesia yang dilakukan sejak Desember 2006. Sementara itu pada kegiatan pembayaran non tunai baik transaksi kliring maupun *BI-RTGS* mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya.

### 3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai

#### 3.1.1 Aliran uang masuk/keluar

Dalam triwulan laporan, aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Pekanbaru mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari Rp3.569,63 miliar atau rata-rata Rp59,49 miliar perhari menjadi Rp637,70 miliar atau rata-rata Rp9,96 miliar per hari. Penurunan ini antara lain disebabkan karena pengeluaran masyarakat kembali normal setelah mengalami peningkatan yang tinggi pada triwulan IV - 2006 sehubungan dengan adanya hari besar keagamaan dan tahun baru, dan pengeluaran pemerintah khususnya untuk belanja modal juga menurun terkait dengan awal tahun anggaran. Sementara itu, aliran uang masuk (*inflow*) dari perbankan ke Bank Indonesia pada periode yang sama juga mengalami penurunan yaitu dari Rp771,16 miliar atau rata-rata Rp12,85 miliar perhari menjadi Rp390,68 miliar atau rata-rata 6,10 miliar perhari. Hal ini sejalan dengan kebijakan ujicoba tahap IV kegiatan penyetoran dan pengambilan uang di Kantor Bank Indonesia, dimana bank hanya diperbolehkan melakukan setoran terhadap Uang Yang Tidak Layak Edar (UTLE). Dengan kondisi tersebut maka pada triwulan laporan terjadi *net outflow* sebesar Rp247,02 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan *net outflow* pada triwulan sebelumnya yang mencapai Rp2.798,47 miliar.

Grafik 3.12. Perkembangan Kas Inflow dan Outflow



### 3.1.2. Penyediaan uang kartal layak edar

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara rutin melakukan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap uang yang tidak layak edar baik yang berasal dari setoran bank maupun penukaran uang. Dalam triwulan laporan, jumlah uang kertas yang di PTTB di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru mencapai Rp94,16 miliar atau 24,10 % dari jumlah uang yang masuk (*Inflow*), turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp258,4 miliar atau 33,51% dari jumlah uang yang masuk.

Selain itu, secara rutin dilakukan kegiatan penukaran uang meliputi : (i) pelayanan penukaran uang lusuh atau rusak yang diselenggarakan pada setiap hari Selasa; (ii) pelayanan penukaran uang pecahan kecil yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis; dan (iii) kegiatan kas keliling atau pelayanan kas yang dilakukan di luar Kantor Bank Indonesia baik di kota Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru. Pada triwulan laporan telah dilaksanakan kegiatan kas keliling di Selatpanjang, Bengkalis, Dumai dan Bagansiapiapi dengan jumlah penukaran mencapai Rp1,6 miliar. Sementara di kota Pekanbaru kegiatan penukaran dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia dengan jumlah penukaran mencapai Rp15,06 miliar.

### 3.1.3. Uang Palsu

Jumlah uang palsu yang ditemukan Bank Indonesia Pekanbaru dari setoran bank umum pada triwulan laporan tercatat sebanyak 22 lembar, atau 0,0002% dari jumlah lembar uang kertas yang masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia, yang berarti dalam setiap 10 ribu lembar uang yang masuk terdapat 2 lembar uang palsu. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,000004 % dari jumlah lembar uang kertas yang masuk. Untuk mengurangi peredaran uang palsu, KBI Pekanbaru terus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah secara langsung kepada masyarakat.

### 3.2. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai

#### 3.2.1. Kliring

Pada triwulan laporan transaksi ekonomi melalui Kliring baik dari jumlah warkat maupun nominal meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah warkat yang dikliringkan pada triwulan laporan mencapai 234.908 lembar atau naik sebanyak 17.989 lembar (8,29%) dari triwulan IV - 2006 yang tercatat sebanyak 216.919 lembar. Kondisi yang sama juga terjadi pada jumlah nominal kliring, dimana pada triwulan laporan mencapai Rp4.572.287 juta atau naik Rp365.782 juta (7,99%) dari triwulan IV - 2006 yang tercatat sebesar Rp4.206.505 juta.

Tabel 3.21. Perkembangan Kliring di Provinsi Riau  
(dalam juta rupiah)

Keterangan	Jumlah Warkat		Jumlah Harian		Tolakan Harian	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
	(satuan)	(juta Rp)	(satuan)	(juta Rp)	(%)	(%)
Tw I 06	277,930	4,558,705	4,483	73,528	0,64	0,68
Tw II 06	282,747	4,598,297	4,560	74,166	0,69	0,82
Tw III 06	259,144	4,585,400	4,113	72,784	0,81	0,99
Tw IV 06	216,919	4,206,505	3,615	70,108	0,95	0,71
Tw.I 07	234,908	4,572,287	3,670	71,442	0,71	0,60

Sementara itu, persentase penolakan cek dan bilyet giro kosong perhari pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan dengan periode Triwulan IV - 2006. Berdasarkan jumlah warkat tolakan cek dan bilyet giro kosong tercatat 0,71% sedangkan berdasarkan nominal sebesar 0,60%.

#### 3.2.2. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Transaksi melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dalam triwulan laporan secara total (masuk dan keluar) meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dalam triwulan laporan total transaksi RTGS mencapai Rp115,87 triliun meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp89,99 triliun. Sementara itu, transfer masuk ke Propinsi Riau mencapai Rp70,62 triliun, meningkat Rp10,22 triliun (16,89%) dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar Rp60,40 triliun, sedangkan transfer keluar dari Propinsi Riau mencapai Rp45,25 triliun meningkat Rp15,66 triliun (52,92%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp29,59 triliun. Peningkatan ini menunjukkan indikasi terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi propinsi Riau dengan daerah lainnya.

Tabel 3.22. Perkembangan Transaksi RTGS  
(Dalam Miliar)

Keterangan	Kumulatif Triwulanan		Rata-rata Harian	
	Dari	Ke	Dari	Ke
Tw I 06	17,619.74	29,914.92	284.19	482.50
Tw II 06	21,688.83	39,679.78	349.82	639.99
Tw III 06	21,973.21	46,747.90	348.78	742.03
Tw IV 06	29,593.11	60,395.59	485.13	990.09
Tw.I 07	45,252.09	70,619.40	707.06	1,103.43

Secara umum transaksi melalui *BI RTGS* ke dan dari Propinsi Riau masih mencatat terjadinya *net inflow*. Hal ini terutama disumbangkan oleh faktor masuknya dana perimbangan yang cukup besar dan indikasi atas meningkatnya aktivitas ekonomi selama triwulan laporan.

### 3.3. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Pedagang Valuta Asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja KBI Pekanbaru hingga triwulan laporan tercatat 18 perusahaan. Berdasarkan data dari 18 Pedagang Valuta Asing tersebut, nilai pembelian Uang Kertas Asing (UKA) pada periode laporan mencapai USD 3.172 ribu atau meningkat sebesar USD373 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 2.799 ribu. Sementara itu nilai penjualan, pada periode laporan mencapai USD 3.196 ribu atau naik sebesar USD361 ribu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD 2.835 ribu.

Tabel 3.23. Perkembangan Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing

Keterangan	Pembelian	Penjualan
	USD	USD
Tw III 06	2,705.55	2,767.71
Tw IV 06	2,799.00	2,835.00
Tw I 07	3,172.00	3,196.00

### 3.4. Strategi Cash Centre Di Indonesia

Implementasi jangka pendek terhadap kebijakan penerapan *Cash Centre* yang dilaksanakan melalui kegiatan uji coba setoran dan bayaran perbankan antar bank di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Pekanbaru sejauh ini berjalan lancar. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari parameter tidak terjadinya kendala yang cukup berarti dalam kegiatan perkasan bank. Dari sisi statistik juga terjadi penurunan signifikan pada jumlah uang yang keluar dari kas Bank Indonesia (*cash outflow*) yaitu dari Rp3.569,63 miliar pada triwulan IV-2006 menjadi Rp637,70 miliar pada periode laporan. Demikian juga halnya dengan aliran uang masuk ke kas Bank Indonesia (*cash inflow*), menurun dari Rp771,16 miliar menjadi Rp390,68 miliar.

## Manfaat Biro Informasi Kredit Bagi Optimalisasi Fungsi Intermediasi Perbankan

Fungsi intermediasi perbankan belumlah pulih seperti sedia kala. Hal tersebut tergambar dari masih relative rendahnya angka Loan to Deposit Ratio (LDR). Keberhasilan perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat belum sepenuhnya diimbangi dengan kenaikan angka penyaluran kredit. Hal mengakibatkan fungsi perbankan sebagai agent of development tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keengganan pihak perbankan tersebut disinyalir akibat masih cukup tingginya angka Non Performing Loan (NPL) sehingga informasi tentang reputasi calon nasabah kredit perbankan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh perbankan dalam proses analisis kelayakan kredit.

Guna meningkatkan keakuratan dan kecepatan dalam pemrosesan kredit tersebut, informasi tentang reputasi calon debitur sangatlah diperlukan oleh perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melalui Biro Informasi Kredit telah menyediakan layanan kepada perbankan dalam bentuk penyediaan informasi melalui "Pusat Informasi Kredit (PIK). Dengan adanya PIK tersebut maka dapat diketahui dengan cepat tentang kredibilitas calon pemohon kredit di perbankan.

Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh perbankan dengan adanya PIK tersebut. Manfaat yang disediakan tersebut tidak hanya terbatas pada reputasi calon debitur, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mereduksi para debitur nakal. Perbankan tidak perlu lagi menggali informasi debitur secara detail yang dapat menyebabkan biaya operasionalnya menjadi lebih boros.

Biro informasi kredit tersebut (PIK) tugas utamanya adalah memuat data yang lebih komprehensif tentang debitur di dunia perbankan maupun non perbankan. Dari PIK tersebut dapat diperoleh berbagai informasi tentang kredit yang diperoleh oleh debitur mulai dari kartu kredit, kredit kendaraan bermotor (KKB), sampai dengan kredit kepemilikan rumah (KPR). Begitu pula dengan ketersediaan informasi kredit yang dsapat disediakan oleh biro tersebut tergolong cukup lengkap mulai dari kredit dengan nilai Rp 1 sampai dengan jumlah maksimal. Embrio dari biro kredit tersebut dikenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur (SID), tapi ketersediaan informasi dengan layanan SID tersebut hanya untuk kredit dengan nominal diatas Rp 50 juta. Dapat dibayangkan informasi yang disediakan mencakup dari debitur kelas teri sampai dengan debitur kelas kakap. Penyediaan informasi tersebut juga bersifat on-line karena dapat diakses oleh setiap anggotanya dengan seketika, sehingga dari sisi waktu dapat menjadi lebih hemat dan pengambilan keputusan dapat lebih cepat. Dengan demikian fungsi intermediasi perbankan dapat segera berangsur pulih. Demikian tidaklah heran jika permintaan terhadap data

reputasi calon nasabah kepada biro baru ini menunjukkan trend yang semakin meningkat. Jika pada akhir tahun 2005 total permintaan terhadap data calon nasabah sebanyak 143.000, maka sampai dengan April 2006 jumlahnya telah naik tajam menjadi sebanyak 238.000 permintaan data.

## Bab 4

### PROSPEK

### PEREKONOMIAN DAERAH

*Secara* umum, pertumbuhan ekonomi Riau (*year on year*) sampai dengan akhir triwulan I - 2007 sangat baik dengan *trend* yang terus meningkat. *Trend* percepatan pertumbuhan yang semakin baik tersebut tentunya harus tetap dijaga agar terus berkelanjutan. Namun, beberapa permasalahan di Riau seperti infrastruktur, distribusi barang dan peningkatan harga minyak goreng yang disebabkan oleh peningkatan harga CPO (*crude palm oil*), dan bahan bangunan yang disebabkan stock yang terbatas dapat menyebabkan pertumbuhan yang melemah apabila tidak segera dibenahi.

*Trend* percepatan pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih besar ke sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor tersier pada satu sisi menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di Riau. Namun di sisi lain, karakteristik ekonomi Riau yang berbasis agroindustri justru belum sepenuhnya mendapat perhatian. Produktivitas sub sektor perkebunan meningkat cukup baik, namun masih menghadapi berbagai kendala. Program revitalisasi perkebunan yang sedang digagas diharapkan dapat memperkuat pembenahan sub sektor tersebut sekaligus mendorong aktivitas ekonomi rakyat.

Dari sisi infrastruktur, krisis energi listrik yang terjadi di Riau belum sepenuhnya dapat teratasi. Pada triwulan II tahun 2007 krisis diperkirakan masih akan memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat harga. Diharapkan berbagai upaya penyelesaian seperti rencana mengembangkan pasokan gas untuk memasok pembangkit tenaga listrik,

percepatan penyelesaian pembangunan proyek pembangkit listrik dapat segera ditindaklanjuti.

Stimulus pembangunan dari realisasi belanja pemerintah juga diperkirakan belum optimal terkait dengan terlambatnya penetapan APBD 2007 di beberapa kabupaten/kota di Riau. Keterlambatan penetapan APBD tersebut terkait dengan perubahan format APBD yang memerlukan konsolidasi dan penyesuaian. Keterlambatan penetapan APBD tentunya berpengaruh pada pelaksanaan realisasi belanja pemerintah yang cukup berpengaruh mendorong momentum pertumbuhan ekonomi saat ini.

Sementara itu, tekanan inflasi ke depan diperkirakan dapat terkendali pada tingkat yang rendah. Diperkirakan inflasi akan cenderung Turun yang didorong oleh penurunan harga beberapa komoditi makanan seperti beras, minimnya sumber tekanan terhadap inflasi *administered prices* serta kecenderungan penguatan nilai tukar rupiah. Beberapa komoditas yang diperkirakan mengalami kenaikan harga adalah minyak goreng yang disebabkan naiknya harga CPO (*crude palm oil*), bahan bangunan seperti batu bata dan besi yang disebabkan persediaan yang terbatas serta biaya pendidikan yang akan memasuki tahun ajaran baru. Di sisi eksternal, kenaikan harga minyak internasional akan diikuti dengan kenaikan harga minyak oleh PT. Pertamina seperti Pertamina dan Pertamina Plus.

Dari sisi perbankan, kondisi ekonomi di Riau diperkirakan akan terus menunjukkan peningkatan pertumbuhan, yang ditandai dengan semakin turunnya tingkat suku bunga kredit akibat penurunan BI-Rate. Penurunan BI-Rate menyebabkan penurunan posisi SBI beberapa Bank Umum, karena penanaman pada instrumen ini hanya menghasilkan *Return* yang relatif rendah dibanding disalurkan dalam bentuk kredit. Apalagi kondisi sektor riil yang sudah semakin pulih, yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta meningkatnya daya beli masyarakat (berdasarkan survey BI), sehingga secara makro tingkat *Credit Risk* sudah relatif rendah dan ini merupakan *moment* yang cukup tepat untuk

melakukan ekspansi kredit perbankan pada sektor riil sehingga pada akhirnya kondisi tersebut akan mendorong penyerapan kredit yang lebih besar dan meningkatkan peran intermediasi perbankan.

Berdasarkan kelembagaan, diperkirakan akan terjadi penambahan bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Riau, hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Riau dan perkembangan ekonomi di kota/kabupaten yang cukup pesat, yang menjadi insentif bagi bank-bank untuk membuka jaringan kantornya.

Sementara itu, perkembangan kegiatan pembayaran tunai diperkirakan akan terus mengalami penurunan terkait dengan kebijakan penerapan/implementasi kegiatan penyetoran dan pengambilan uang di kantor Bank Indonesia yang dilakukan sejak Desember 2006. Namun, kegiatan pembayan non tunai baik kliring maupun RTGS akan terus mengalami peningkatan terkait dengan realisasi proyek-proyek pemerintah.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Riau pada triwulan II tahun 2007 dalam meningkatkan peran intermediasi perbankan dan mendorong aktivitas di sektor riil antara lain dengan :

- Memberikan stimulus dalam upaya meningkatkan APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga menggerakkan perekonomian Propinsi Riau.
- Memberikan sosialisasi kepada perbankan agar meningkatkan peran intermediasinya sehingga penyaluran kredit dapat diberikan secara maksimal kepada sektor riil.
- Mempercepat pelaksanaan revitalisasi perkebunan dalam perannya untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran di Propinsi Riau.

#### Aktiva Produktif

Adalah penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.

#### Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Adalah pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan.

#### Kualitas Kredit

Adalah penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

#### Capital Adequacy Ratio (CAR)

Adalah rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

#### Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adalah dana yang diterima perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

#### Financing to Deposit Ratio (FDR)

Adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

### Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

### Inflasi *Administered Price*

Inflasi yang terjadi pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (misalnya bahan bakar).

### Inflasi Inti

Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran agregat and permintaan agregat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan ekspektasi masyarakat.

### Inflasi *Volatile Food*

Inflasi yang terjadi karena pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya bergerak sangat volatile (misalnya beras).

### Kliring

Adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

### Kliring Debet

Adalah kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggaran kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

### Kliring Kredit

Adalah kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di KP Bank Indonesia tanpa menyampaikan fisik warkat (*paperless*).

### Loan to Deposit Ratio (LDR)

Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan dan deposito).

#### Net Interest Income (NII)

Adalah antara pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga.

#### Non Core Deposit (NCD)

Adalah dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 10% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

#### Non Performing Loans/Financing (NPLs/Ls)

Adalah kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet

#### Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Adalah suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan).

#### Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Adalah rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ysb.

#### Rasio Non Performing Loans (NPLs) – Net

Adalah rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit

#### Sistem Bank Indonesia Real Time Settlement (BI RTGS)

Adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

#### Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)

Adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.